



PERAN MUHAMMADIYAH DALAM MENGHADAPI  
KEBIJAKAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA  
TAHUN 1912-1942

Tesis

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Akademik  
Guna Memperoleh Gelar Magister Humaniora (M.Hum)  
Program Studi Sejarah Peradaban Islam  
Konsentrasi Islam Di Indonesia

Oleh :

Abu Hanifah

NIM : 080301103

PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG

2010

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **Latar Belakang Masalah**

Bangsa Belanda datang ke wilayah Nusantara pada akhir abad ke XVI (1595-1600 ), untuk mengembangkan usaha perdagangan, yaitu mendapatkan rempah-rempah yang mahal harganya di Eropa. Pada masa ini beberapa perseroan perdagangan bergabung dan disahkan oleh “*Staten General Republik*” dengan satu piagam yang memberi hak khusus kepada perseroan gabungan tersebut untuk berdagang, berlayar dan memegang kekuasaan di kawasan Nusantara. Perseroan itu bernama *Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC)*.” (Yatim 2005, hal. 234). Sampai dengan abad ke XVIII, perseroan ini mengorganisir pedagang-pedagang Belanda dalam melakukan perdagangan dengan masyarakat pribumi, pada tahap awal ini mereka hanya bergerak di sektor ekonomi atau belum memasuki wilayah politik.

Pada akhir abad ke XVIII (1799) VOC bubar. Kekuasaan diambil alih oleh Pemerintah Belanda, sehingga pada awal abad ke XIX Pemerintah Hindia Belanda mulai mengambil langkah-langkah kebijakan baru. Dalam masa penjajahan, pemerintah Belanda menekan dan menindas Islam. Semua aspek kegiatan dan gerakan Islam selalu dicurigai. Akibatnya terjadi percepatan kemunculan Islam sebagai pemersatu umat dalam melawan Belanda. Sehingga lahirlah politik etis pada pemerintah Belanda dalam menghadapi Islam.

Mendekati masa-masa akhir pendudukannya di Hindia Belanda, pemerintah Kolonialis mulai memberikan porsi kepada organisasi-organisasi politik dan non politik untuk ikut menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda, hal ini dinyatakan oleh Ricklefs sebagai berikut :

Langkah paling nyata ke arah desentralisasi dan peningkatan peran serta orang-orang Indonesia dalam pemerintahan adalah pembentukan *Volksraad* (Dewan Rakyat), yang menyelenggarakan sidangnya yang pertama pada tahun 1918. Asal usul lembaga ini berkaitan erat dengan aksi *indie Weerbaar* (pertahanan Hindia). *Volksraad* didirikan sebagai lembaga dengan satu majelis yang hanya mempunyai wewenang menasehati, tetapi kalau menyangkut masalah keuangan dikonsultasikan oleh gubernur jendral. (Ricklefs 2007, hal. 244)

Dalam perkembangan selanjutnya dewan ini memberikan porsi sampai 40 % bagi tokoh-tokoh nasionalis dan agamis untuk duduk dalam dewan rakyat, dan melalui dewan ini, mereka dapat menyalurkan aspirasi masyarakat pribumi kepada pemerintah Hindia Belanda, akan tetapi pembentukan dewan ini tidak secara sungguh-sungguh diupayakan pemerintah, sebagaimana pernyataan Ricklefs :

Pada masa awalnya *Volksraad* merupakan sumber banyak kecaman dan desakan terhadap pemerintah Kolonial. Suatu *staatsinrichting* (konstitusi) baru untuk Indonesia yang diberlakukan pada tahun 1925 telah menurunkan fungsi Dewan Hindia menjadi badan penasehat dan memberi *volksraad* wewenang-wewenang legislative yang terbatas, ... (Ricklefs, hal. 245)

Kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada masyarakat pribumi untuk duduk dalam *Volksraad*, mendorong beberapa orang tokoh politik Indonesia untuk terlibat di dalamnya dan menyalurkan aspirasi masyarakat pribumi melalui dewan ini, akan tetapi fungsi dan wewenang dewan ini sangat terbatas, sehingga dalam kenyataannya usulan anggota dewan yang menyangkut kesejahteraan atau kepentingan masyarakat pribumi lebih sering tidak dipenuhi.

Pada abad ke 19 sampai awal abad 20, pemerintah Hindia Belanda tidak memberi kesempatan yang luas kepada penduduk pribumi untuk mengenyam pendidikan secara layak. Lembaga pendidikan milik pemerintah hanya menerima anak-anak pribumi dari kalangan aristokrat dan birokrat, hal ini terlihat dalam peraturan pemerintah Hindia Belanda tahun 1818, yaitu :

Membolehkan orang Jawa memasuki pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial. Namun dalam kenyataannya hanya sedikit saja orang Jawa yang dapat memasuki sekolah-sekolah tersebut, sebab banyak persyaratan yang pada hakekatnya justru dipasang untuk membatasi kesempatan belajar mereka. Selain itu dana pendidikan hanya diberikan kepada para anak kepala negeri dan orang-orang terkemuka untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam hal ini, sesungguhnya pendidikan barat dalam tingkat tertentu dimaksudkan untuk kepentingan kolonialisme. (Arifin 1990, hal. 62)

Kebijakan tersebut hanya diberikan kepada kalangan bangsawan, yang dimaksudkan untuk mencetak tenaga kerja bagi kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan masyarakat pribumi pada umumnya, sangat jarang yang dapat mengenyam pendidikan di sekolah milik pemerintah. Kebijakan tersebut mengakibatkan keterbelakangan dikalangan penduduk pribumi, hal ini sengaja dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam rangka mempertahankan keberadaan mereka, yaitu dengan cara menjalin hubungan dengan kalangan aristokrat melalui pendidikan.

Keberpihakan Pemerintah Hindia Belanda terhadap lembaga-lembaga pendidikan non Islam, terlihat pada pemberian subsidi yang tidak merata terhadap lembaga pendidikan yang dikelola pribumi muslim, seperti sekolah, pesantren atau madrasah yang tidak mendapat perhatian secara adil jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan Kristen yang mendapat bantuan dana atau subsidi yang cukup dari pemerintah.

Selain itu Pemerintah Hindia Belanda menerapkan peraturan yang disebut guru *ordonnantie*, suatu peraturan Kolonial Belanda untuk mengatur sekolah *partikelir* (swasta), yaitu :

sekolah yang tidak didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. *Ordonansi* tersebut memberi kuasa kepada pemerintah kolonial untuk mengurus wujud, isi, kurikulum, guru dari sekolah partikelir. Dengan ordonansi itu pemerintah bermaksud melemahkan dan mematikan sekolah-sekolah partikelir, seperti taman Siswa, Muhammadiyah, Institut Ksatrian, Perguruan Rakyat, dan lain-lain karena disekolah itu cita-cita, ide-ide, dan semangat kemerdekaan Indonesia di tanamkan pada zaman pergerakan nasional. (soekanto 1997, hal. 298)

Ketidakadilan pemerintah Hindia Belanda, terlihat juga dalam pemberian subsidi terhadap rumah ibadah, masjid-masjid hanya menerima subsidi yang sangat kecil dibandingkan dengan subsidi yang mereka berikan kepada gereja. “Pada awal abad XX, keberpihakan pemerintah Hindia Belanda terhadap kristenisasi didorong oleh desakan partai-partai Kristen yang menuntut penerapan prinsip-prinsip kristenisasi di dalam pemerintahan.” (Rickleps, hlm. 103) “Mereka menuntut agar pemerintah Hindia Belanda terbuka untuk kegiatan misi keagamaan, serta dukungan pemerintah kolonial terhadap kegiatan tersebut.” (Arifin, hal. 44)

Di masa-masa ahir pendudukannya di wilayah Nusantara, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan di bidang kebudayaan, yaitu dengan cara mewajibkan bahasa Belanda dan membiasakan budaya Eropa terhadap kalangan priyayi yang mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah pemerintah, yang diharapkan dapat menjadi contoh dalam kehidupan masyarakat dan dapat mensosialisasikan budaya Belanda dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda menerapkan hukum dan peraturan yang mengacu kepada hukum dan peraturan yang berlaku di kerajaan Belanda. Hal ini mereka terapkan dengan maksud untuk mewujudkan bangsa yang terbiasa dengan pola kehidupan bangsa Belanda dan bisa

berterima kasih serta tidak melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda.

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda di bidang politik, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat pribumi, terutama terhadap kalangan masyarakat Islam. Mendorong munculnya keinginan yang kuat di kalangan tokoh-tokoh Islam untuk memperjuangkan perbaikan kondisi atau nasib masyarakat Islam, dengan cara memperbaharui pola perjuangan umat Islam. Sehubungan dengan ini Deliar noer mengatakan :

Kira-kira pada pergantian abad ini banyak orang Islam Indonesia menyadari bahwa mereka tidak akan mungkin berkompetisi dengan kekuatan-kekuatan yang menantang dari pihak kolonialisme Belanda, penetrasi Kristen dan perjuangan untuk maju di bagian-bagian lain Asia apabila mereka terus melanjutkan kegiatan dengan cara-cara tradisional dalam menegakkan Islam. Mereka mulai menyadari perlunya perubahan-perubahan, apakah ini dengan menggali mutiara-mutiara Islam dari masa lalu yang telah memberikan kesanggupan kepada kawan-kawan mereka se agama di abad tengah untuk mengatasi barat dalam ilmu pengetahuan serta dalam memperluas daerah pengaruh atau dengan mempergunakan metode-metode baru yang telah dibawa ke Indonesia oleh kekuasaan kolonial serta pihak misi Kristen. (Noer, hal. 37)

Pada awal abad ke XX, tokoh-tokoh nasional mulai menyadari tentang pentingnya memperjuangkan hak dan kedudukan yang sama bagi bangsa Indonesia di bidang politik, dan oleh sebab itu tokoh-tokoh nasionalis memelopori pembentukan organisasi modern sebagai wadah yang menampung orang banyak untuk berkerja sama dalam mencapai tujuan yang sama, yaitu perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan dan pembentukan suatu pemerintahan yang bebas dari intervensi politik bangsa lain.

Dalam kurun waktu yang cukup panjang, organisasi-organisasi politik tersebut berhasil memupuk dan menumbuhkan sikap nasionalisme dikalangan masyarakat pribumi, tokoh-tokohnya senantiasa menunjukkan sikap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah, bahkan ikut memelopori berbagai pemberontakan yang mengakibatkan tokoh-tokohnya ditangkap dan diasingkan, namun demikian organisasi yang telah mereka bentuk tidak pernah mati, bahkan pada masa menjelang kemerdekaan menjadi kekuatan politik yang berhasil menyatukan aspirasi masyarakat pribumi dalam perjuangan memperoleh kemerdekaannya.

Di samping melakukan pembaharuan bentuk dan cara perjuangan di bidang politik, tokoh-tokoh nasional pada saat itu juga melakukan pembaharuan di bidang pendidikan, yaitu melakukan perubahan bentuk dan cara pendidikan pribumi yang bersifat tradisional menjadi lembaga pendidikan yang menerapkan sistem dan cara-cara

modern, yang dikelola oleh suatu organisasi yang tidak menggantungkan perkembangan sekolah kepada seorang figur saja. Di sisi yang lain, sekolah-sekolah modern tersebut memiliki kedudukan yang setara dengan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Begitu pula pembaharuan di bidang keagamaan, dilakukan dengan cara merubah paradigma berpikir kalangan ulama tradisional yang menolak modernisme, menjadi terbuka dalam menerima perubahan yang diakibatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sepanjang tahun 1912-1942, muncul kesadaran dikalangan ulama untuk membentuk organisasi yang bersifat keagamaan, yang disadari dapat menjadi wadah bagi para ulama untuk menjalin kerja sama dalam menghadapi kebijakan keagamaan pemerintah Hindia Belanda yang mengakibatkan disharmonisasi antara kalangan ulama dan adat, serta beberapa kebijakan keagamaan lain yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan organisasi sosial, politik dan keagamaan yang mewarnai perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Seorang ulama muda yang bernama K.H. Ahmad Dahlan terdorong untuk berpartisipasi membangun bangsanya, Dia adalah:

seorang ulama yang pernah menetap di Makkah dan memperdalam ilmu-ilmu ke-Islaman dan menyerap ide-ide pemurnian dan pembaharuan Islam yang dikembangkan oleh Muhammad Abdul Wahhab, Muhammad Abduh dan muridnya Syaikh Rasyid Ridha, baik melalui pertemuan langsung maupun melalui majalah Al-Urwatul Wutsqa. Pada saat pulang ke Yogyakarta beliau mendirikan kelompok pengajian tafsir Al-Manar yang merupakan cikal bakal dari persyarikatan Muhammadiyah. (Ma'arif 2005, hal. 21)

Ide pemurnian Islam yang dikembangkan oleh K.H.A. Dahlan kepada murid-muridnya di Yogyakarta, memiliki kesamaan dengan pemurnian Islam yang dikembangkan Muhammad Ibnu Abdul Wahab di Hijaz yang terkenal dengan sebutan Wahabiah, yang bertujuan membersihkan tauhid masyarakat Islam dari pengaruh syirik dan mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan As-sunnah. sedangkan dalam dunia pendidikan, Beliau merujuk kepada pembaharuan pemikiran yang dikembangkan Muhammad Abduh yang diterapkannya dalam memperbaiki kurikulum pendidikan Universitas Al-Azhar Kairo, dengan cara mengadopsi kurikulum umum dan mendirikan jurusan-jurusan yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Persyarikatan Muhammadiyah berasal dari nama “Nabi Muhammad, S.A.W. yang ditambahi “ya” nisbiah yang berarti pengikut nabi Muhammad, merupakan persyarikatan yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan bersama beberapa orang tokoh ulama, pada tanggal 8 Nopember 1912 di kota Yogyakarta.” (Mulkan 1990, hal. 27) Organisasi ini di beri nama Muhammadiyah dengan maksud memberikan pemahaman kepada masyarakat Islam pada saat itu, agar kembali kepada ajaran Nabi Muhammad secara konsekwen dan murni dari berbagai praktek Syirik, bid’ah dan sifat-sifat yang tercela. Tidak diberi nama Ahmad Dahlan sebagai pendirinya, dengan maksud agar umat Islam yang tengah mengalami kemerosotan pada saat itu, tidak melakukan pengkultusan terhadap pendirinya

Muhammadiyah sebagai gerakan pemurnian dan pembaharuan Islam yang lahir dan berkembang di Indonesia, muncul berdasarkan “dorongan kondisi-kondisi yang hadir dan mengitari dunia Islam di Indonesia pada permulaan abad ke 20, antara lain kondisi sosial politik, kultural dan keagamaan.” (Sairin 1999, hal. 23). Kondisi sosial masyarakat Indonesia yang dijajah oleh Belanda, menyebabkan hilangnya wibawa kepala pemerintahan atau kesultanan-kesultanan Islam, bahkan di beberapa tempat “Pemerintah Hindia Belanda memperlakukan raja sebagai pegawai kerajaan Belanda yang di gaji.” (Rickleps, hlm. 171)

Di masa penjajahan “rakyat jelata mengalami kondisi yang memprihatinkan, hidup dalam kemiskinan dan kebodohan yang disebabkan oleh pemerasan kekayaan alam dan hasil pertanian rakyat.” (Vlekke 2007, hal. 99) Begitu pula “di bidang kebudayaan atau pendidikan, masyarakat pribumi dan umat Islam khususnya mengalami keterbelakangan dan kebodohan yang disebabkan oleh pembatasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat pribumi untuk mengikuti proses pendidikan di sekolah milik pemerintah.” (Musawir 1996, hal. 124) Demikian juga di bidang keagamaan, “penyimpangan aqidah, ibadah dan akhlaq merupakan fenomena yang menjadi corak keberagaman masyarakat Islam pada saat itu.” (Suwarno 1995, hal. 27)

Pada awal pembentukan Muhamadiyah, organisasi ini bertujuan untuk “Menyebarkan pengajaran Agama Kanjeng Nabi Muhammad Saw kepada penduduk bumi putera di dalam Residensi Yogyakarta” (Mulkan, hal. 94) Pada masa-masa selanjutnya berkembang ke seluruh pulau Jawa dan akhirnya ke seluruh pelosok Nusantara. Perluasan wilayah dakwah muhammadiyah tersebut, diiringi pula dengan perubahan redaksi tujuan Muhammadiyah yang menyangkut wilayah dakwahnya,”Memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam

di Hindia Nederland.” (Suwarno, hal. 39) Sedangkan “Kegiatan-kegiatan gerakan ini, sejak mula terbentuk meliputi kegiatan da’wah Islam amar ma’ruf nahi munkar, seperti kegiatan sosial dan pendidikan.” (Hasyim 1990, hal. 47)

Sebagai organisasi pembaharuan Islam yang tumbuh di zaman penjajahan, Muhammadiyah berhadapan langsung dengan berbagai kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Dalam hal ini Muhammadiyah tidak pernah bersikap kooperatif dan tidak pula bersikap non Kooperatif. “Muhammadiyah sejak awalnya tidak menganut haluan kepartaian ataupun bergerak dalam kegiatan politik, namun anggota-anggotanya dibebaskan berpolitik, bahkan membawa aspirasi Muhammadiyah ke dalam lingkup politik.” (Arifin, hal. 100) Dalam hal ini, Muhammadiyah lebih cenderung memperlihatkan sikap partisipasi aktif dalam perjuangan politik “Sejak awal Dahlan memang aktif dalam gerakan politik, seperti dalam Djami’atul chair di Jakarta dan Boedi Oetomo di Yogyakarta serta Sarekat Islam di Surakarta.” (Arifin, hal.100) begitu pula dengan Pimpinan muhammadiyah yang lain seperti ”KH. Fakhruddin yang pernah menjabat sebagai bendahara Sarekat Islam.” (Hadikusuma T.T, hal. 28)

Hubungan Muhammadiyah dengan Sarekat Islam mengalami masa suram “akibat keputusan Sarekat Islam di Randublatung untuk mendisiplin Muhammadiyah pada pertengahan tahun 1926.” (Hadikusuma, hal. 29) Namun demikian secara fungsional, hubungan Muhammadiyah dengan Sarekat Islam tetap berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh “Sarekat Islam membutuhkan Muhammadiyah untuk meningkatkan pengaruh politik, di pihak lain Muhammadiyah membutuhkan Sarekat Islam untuk menyalurkan aspirasi politik.” (Arifin, hal. 103)

Setelah mendapatkan tindakan disiplin dari Sarekat Islam, beberapa orang tokoh Muhammadiyah berkerja sama dengan beberapa tokoh Islam lainnya untuk “mendirikan Partai Islam Indonesia (PII) yang didirikan pada tanggal 4 Desember 1938, ... KH. Mas Mansur duduk menjadi penasehat partai, suatu kedudukan yang tidak langsung mempunyai tanggung jawab terhadap pertikaian di dalam lingkungan partai.” (Noer, hal. 177)

Partisipasi aktif Muhammadiyah dalam perjuangan bangsa lebih cenderung bersifat kultural yang diwujudkan dalam bentuk amalan-amalan nyata, salah satu amal usaha yang dikembangkan Muhammadiyah dalam bergerak meraih tujuannya ialah :

Memajukan dan memperbaharui pendidikan, pengajaran dan kebudayaan serta memperluas ilmu pengetahuan menurut tuntunan Islam. Muhammadiyah telah mengadakan pembaharuan pendidikan agama dengan jalan modernisasi dalam



sistem pendidikan, menukar system pondok dan pesantren dengan sistem pendidikan yang modern yang sesuai dengan tuntunan dan kehendak zaman.” (Tim AIK UMM 1990, hal. 154)

dan lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah tersebut, memberikan kesempatan yang sama kepada semua kalangan untuk mendapatkan hak yang sama dalam mengeyam pendidikan.

Dalam bidang sosial kemasyarakatan, seperti penyantunan anak yatim dan masyarakat miskin dilakukan oleh Muhammadiyah dengan cara membentuk “Majelis Pertolongan Umat (PKU), yang membawahi rumah sakit Muhammadiyah yang memberikan pelayanan kesehatan tanpa membedakan kelas sosial,”(Deppen R.I 1986, hal. 132) Selain itu majelis ini menangani “panti-panti asuhan yang menampung anak-anak yatim yang disebabkan kehilangan orang tua karena perang, dan lembaga penyalur infak, sadaqah dan zakat yang berasal dari kaum yang mempunyai harta untuk disampaikan kepada mustahiqnya.” (Suwarno, hal. 61)

Di bawah kekuasaan kolonial Hindia Belanda (1912-1942) Muhammadiyah muncul ke permukaan sejarah sebagai gerakan Islam yang berusaha mengangkat citra umat Islam melalui berbagai pikiran dan amal usaha. “Dalam hal ini Muhammadiyah menjawab tantangan kultural dan keagamaan yang strategis, bentukan yang kuat dari proses tersebut adalah pengembangan jiwa nasionalisme secara sistematis di bidang pendidikan, keagamaan dan kemanusiaan.” (Arifin, hal. 17)

Kehadiran Muhammadiyah merupakan simbol manifestasi kesadaran kolektif, sekaligus penolakan terhadap birokrasi kolonial. Pembaharuan yang dilakukan Muhammadiyah telah berhasil memobilisasi pembaharuan sosial yang bersifat nasional dan keagamaan sebagai dasar perlawanan umat Islam terhadap kolonialis. Dalam hal ini “Muhammadiyah menerapkan ideologi perlawanan yang berorientasi kepada pembaharuan sosial dengan mempertahankan Islam sebagai identitas kultural yang menolak otoritas birokrasi Kolonial.” (Arifin, hal. 17)

Beranjak dari uraian tersebut, George Turnan Mc Kahin, seorang pengarang bangsa Amerika dalam bukunya *Nationalism and Revolution in Indonesia*, yang diterbitkan oleh *Cornell University Press, Ithaca*, yang diterjemahkan Wirjosukarto sebagai berikut :

Dapat dikatakan bahwa Muhammadiyah yang didirikan K.H.A. Dahlan, ... Pada mula usahanya terutama ditujukan dalam bidang pendidikan, kemudian meluas kegiatannya kepada usaha-usaha sosial lainnya seperti Rumah Sakit, penyantun

fakir miskin dan anak yatim, penerbitan Al-Qur'an dalam bahasa Jawa dan melayu, perpustakaan dan pendirian sekolah-sekolah Islam. Usaha ini merupakan penyebar kebudayaan Islam dan pikiran-pikiran non politik dari gerakan modernist itu. Organisasi itu sendiri tidak berpolitik, tetapi membolehkan anggotanya menjalankan aktivitas politik secara perseorangan. (Wirjosukarto 1968, hal. 22)

Penjelasan tersebut diperkuat oleh keterangan pengawas aktivitas Islam dan kegiatan Muhammadiyah, seperti Rinkeles dan Schrieke yang menyatakan tidak pernah melaporkan sikap anti kolonial Dahlan. (Arifin, hal. 17) Pendapat tersebut di bantah oleh Bousquet, yang mengatakan :

Tetapi adalah salah sekali menganggap bahwa anggota-anggotanya tidak mempunyai kecenderungan politik. Adalah tidak sama sekali keliru untuk dikatakan bahwa mereka sangat anti Belanda seperti Nasionalis lainnya, ... Sebenarnya konsepsi sosial Islam yang progresif yang ingin dikemukakannya tidak dapat dilepaskan dari nada politik. Dalam hal ini Muhammadiyah dapat membantu dengan memperkembangkan kesadaran politik anggota-anggotanya dan murid-murid yang belajar dalam sekolah-sekolahnya yang banyak itu. Usaha itu diam tapi mendalam, merupakan bantuan kepada aliran nasionalisme dan dengan tenang tetapi langsung memelihara dan memperkuat aliran tersebut.” (Hamzah 1968, hal. 22)

Meninjau kedua pendapat tersebut, penulis lebih cenderung menyetujui pendapat yang menyatakan bahwa Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H.A. Dahlan “bukanlah organisasi yang bergerak dalam bidang politik praktis, melainkan suatu gerakan da'wah yang mengarahkan gerak langkahnya kepada pembentukan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.” (Arifin, hal.100) Namun, itu tidak berarti Muhammadiyah tidak memperhatikan politik dan sama sekali tidak pernah bersinggungan dengan kegiatan politik. Seperti yang terlihat pada usaha K.H.A. Dahlan dalam “memajukan pendidikan, keagamaan dan da'wah Islam, kegiatan sosial seperti mendirikan Rumah sakit dan panti asuhan bagi anak-anak korban perang. Semua usaha itu dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, persaudaraan, dan nasionalisme.” (Abdulgani, dkk. 1985, hal. 62) kepada anggota-anggotanya atau kepada peserta didiknya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa usaha-usaha Muhammadiyah telah memberikan kontribusi yang besar dalam memajukan bangsa Indonesia, yaitu telah melahirkan sikap cinta tanah air, dan keinginan memerdekakan diri dari penjajahan, dan oleh karena itu, Muhammadiyah tidak pernah menyatakan non kooperasi atau kooperasi dengan pemerintah Hindia Belanda. Tidak dapat di pungkiri bahwa “sekolah-sekolah Muhammadiyah pernah mendapat subsidi dari Pemerintah Hindia Belanda, namun

Muhammadiyah tahu betul bahwa apa yang dilakukannya bukan merupakan sikap kooperatif, karena bantuan yang diterimanya berasal dari pajak ...Bangsa Indonesia.” (Sukrianto 1995, hal.28) Sebagaimana yang dikatakan Dr. Ruslan Abdul Gani, bahwa “Muhammadiyah sejak berdirinya pada tahun 1912 tidak dapat disangkal merupakan bagian dari perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia.” (Sukanto, hal. 301).

Selain itu berbagai usaha-usaha Muhammadiyah tersebut, merupakan reaksi terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang tidak menguntungkan bagi kehidupan masyarakat muslim Indonesia pada saat itu, dan dalam mengembangkan amal usahanya Muhammadiyah lebih cenderung melakukan kegiatannya dengan cara pendekatan edukatif-paedagogis, ketimbang melalui cara politik Mengingat bahwa secara resmi, sejak berdirinya hingga sekarang, Muhammadiyah itu bukan partai politik atau organisasi yang aktif berjuang dalam bidang politik. Namun, Muhammadiyah sepanjang sejarah dan perjuangannya tidak pernah absen dan selalu ikut serta membela kepentingan agama, bangsa, dan tanah air.

Meninjau penjelasan beberapa penulis atau pengamat Muhammadiyah tersebut, penulis dapat mengatakan bahwa Muhammadiyah berperan cukup besar dalam menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia sepanjang tahun 1912-1942, dan dalam menjalankan perannya tersebut Muhammadiyah lebih cenderung menempuh jalan partisipasi aktif, bukan melalui jalur politik praktis, yaitu jalan yang merupakan pengamalan dari perintah-perintah Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an, terutama hasil renungan K.H.A. Dahlan terhadap Q. S. Ali Imron/3 : 104 dan Q. S. Al-Maun/107 : 1-7. K.H.A. Dahlan lebih cenderung memilih gerakan sosial, karena beliau menyakini bahwa jika masyarakat Islam di Indonesia mengamalkan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya maka secara otomatis akan terbentuk tatanan nilai yang Islami. Di samping itu, sikap non politik yang dilakukan Muhammadiyah dimaksudkan untuk melindungi anggota-anggotanya dari sikap curiga pemerintah Hindia Belanda terhadap pergerakan politik yang ada pada saat itu.

Bertitik tolak dari kondisi masyarakat Islam Indonesia, dan kebijakan pemerintah Hindia Belanda di bidang politik, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan. Perkembangan persyarikatan Muhammadiyah dan peranannya dalam menghadapi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda dari tahun 1912 sampai dengan 1942. Penulis merasa tertarik untuk menelitinya, namun demikian penulis menyadari bahwa, banyak kekurangan yang disebabkan berbagai keterbatasan, baik di bidang finansial, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian ini, seputar catatan sejarah

## mengenai **PERAN MUHAMMADIYAH DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA TAHUN 1912-1942.**

### **Identifikasi Masalah**

Bertitik tolak dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan Muhammadiyah, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan sikap dan peran Muhammadiyah dalam menghadapi kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang berlangsung dari tahun 1912 sampai dengan tahun 1942, yaitu :

1. Apa saja kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang berlangsung dari tahun 1912-1942 ?
2. Apa tujuan kebijakan Pemerintah Hindia Belanda tersebut ?
3. Apa latar belakang penerapan politik etis?
4. Mengapa pemerintah Hindia Belanda membentuk Volksraad (Dewan Rakyat) ?
5. Mengapa Pemerintah Hindia Belanda menerapkan ordonansi pendidikan 1905, 1925 dan 1932 ?
6. Mengapa pemerintah Hindia Belanda menerapkan westernisasi dan Kristenisasi terhadap kalangan bangsawan Indonesia ?
7. Bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada tahun 1912-1942 ?
8. Peran atau langkah-langkah apa yang dilakukan Muhammadiyah dalam menghadapi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda ?
9. Apakah protes Muhammadiyah terhadap kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda berdampak positif terhadap nasib masyarakat pribumi ?
10. Bagaimana sikap dan peran Muhammadiyah terhadap kebijakan Pemerintah Hindia Belanda dari tahun 1912 sampai dengan 1942 ?

### **Pembatasan dan Rumusan Masalah**

Muhammadiyah lahir pada tahun 1912, merupakan gerakan da'wah Islam amar ma'ruf nahi munkar yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Selaku pergerakan yang lahir di zaman kolonialis Hindia Belanda, Muhammadiyah berhadapan dengan berbagai kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat pribumi, terutama yang menyangkut berbagai kepentingan umat Islam, seperti masalah politik, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan.

Mengingat berbagai keterbatasan, penulis membatasi penelitian ini dalam masalah sikap dan peran Muhammadiyah dalam menghadapi kebijakan pemerintah Hindia

Belanda di bidang politik, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan Untuk lebih memfokuskan penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi Masyarakat Islam dan kebijakan politik, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia tahun 1912-1942 ?
2. Bagaimana Sikap dan Peran Muhammadiyah dalam menghadapi kebijakan politik, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia tahun 1912-1942 ?

### **Tujuan Penelitian**

Bertolak pada perumusan pertanyaan yang diajukan pada pokok-pokok masalah penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi Masyarakat Islam Indonesia dan kebijakan politik, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia tahun 1912-1942 ?
2. Untuk mengetahui Sikap dan peran Muhammadiyah dalam menghadapi kebijakan pemerintah Hindia Belanda tahun 1912-1942.

### **Kegunaan Penelitian**

Dengan memperhatikan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Memberikan Deskripsi mengenai peran Muhammadiyah dalam mensikapi kebijakan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia pada tahun 1912-1942
2. Mengupayakan suatu kontribusi bagi perkembangan khazanah pengetahuan keislaman di lingkungan institusi pendidikan tinggi Islam, khususnya pada kajian tentang peran muhammadiyah dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1912-1942
3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber acuan dan referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

### **Tinjauan Pustaka**

Pembahasan mengenai organisasi Muhammadiyah sebagai suatu gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia yang lahir pada masa kolonial dan berbagai amal usahanya di bidang pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan serta kaitannya dengan kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang berlangsung dari tahun 1912-1942,

sudah di bahas dalam beberapa karya ilmiah. Akan tetapi, pembahasan tentang sikap dan peran Muhammadiyah dalam menghadapi kebijakan politik, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan pemerintah Hindia Belanda tahun 1912-1942, belum di bahas secara khusus. berikut beberapa tulisan yang terkait dengan penelitian penulis, antara lain:

*Satu Abad Muhammadiyah*, disusun oleh Majelis Pendidikan Tinggi dan Pengembangan PP. Muhammadiyah, menjelaskan tentang berdirinya Muhammadiyah dan periodisasi perkembangan Muhammadiyah pada tahun 1912-1923, yang meliputi perjuangan mencari kekuatan hukum, membangun gerakan dasar dan perluasan ruang lingkup organisasi. Selain itu menjelaskan pula tentang gagasan keagamaan Muhammadiyah pada tahun 1924-1937, yang terjadi di pulau Jawa dan di luar Jawa, Perkembangan dan dinamika Gerakan Muhammadiyah 1934-1937, yang meliputi Pertumbuhan organisasi dan lembaga pendidikan, ide-ide keagamaan, sosial kemasyarakatan dan ketarjihan.

*Matahari-Matahari Muhammadiyah*, Djarnawi Hadikusuma, berisi biografi beberapa Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari tahun 1912-1942, yaitu K.H. Ahmad Dahlan dengan ide-ide pemurnian yaitu gerakan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan pembaharuan Islam yaitu gerakan yang memodrenisir pemikiran masyarakat Islam dengan cara menerima pemikiran barat ke dalam urusan *mu'amalah Duniawiyah*. Selain itu dipaparkan pula tentang kepribadian K.H. Ibrahim sebagai sosok Kiyai yang lembut dan menguasai ilmu agama Islam secara mendalam, K.H. Hisyam yang memiliki kelebihan dalam pengelolaan lembaga pendidikan, sehingga dimasa kepemimpinannya sekolah-sekolah Muhammadiyah mendapat pengakuan dari pemerintah Hindia Belanda dan mendapat subsidi sebagaimana yang diperoleh sekolah-sekolah milik kristen dan K.H. Mas Mansur, seorang tokoh Muhammadiyah yang membidani lahirnya Partai Islam Indonesia pada tahun 1937.

*Muhammadiyah Potret yang Berubah*, karya MT. Aripin, mendeskripsikan tentang telaah ulang terhadap sejarah Muhammadiyah sebagai organisasi yang senantiasa melakukan pembaharuan-pembaharuan dibidang pendidikan, keagamaan maupun kebudayaan, hal ini dilakukannya untuk mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, gerakan westernisasi dan sikap tidak netral dalam masalah agama yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Di samping buku ini membahas tentang reaksi Muhammadiyah terhadap beberapa kebijakan pemerintah

Hindia Belanda serta kaitan dan partisipasi Muhammadiyah dalam beberapa gerakan politik yang pernah muncul di awal abad ke 20.

*Perkembangan Pemikiran Muhammadiyah dari Masa ke Masa*, karya Sukrianto, AR, yang berisi dokumen sejarah perkembangan pemikiran dalam Muhammadiyah yang dikemukakan dalam kongres dan muktamar Muhammadiyah, yang memuat tentang penjelasan mengenai arah dan upaya dalam membawa umat untuk memperjuangkan cita-cita Muhammadiyah. Buku ini juga memuat tentang reaksi Muhammadiyah terhadap beberapa kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam masalah pendidikan, keagamaan dan kebudayaan. Sehubungan dengan ini dimuat beberapa pidato pimpinan Muhammadiyah dalam beberapa kali kongres Muhammadiyah yang dibacakan dihadapan penasehat agama pemerintah Hindia Belanda

Berdasarkan uraian beberapa penulis yang terdapat dalam beberapa buku tersebut, penulis menemukan penjelasan tentang proses kelahiran Muhammadiyah sebagai salah satu pergerakan nasional yang muncul sebagai jawaban dari keprihatinan beberapa ulama terhadap kebodohan, ketertinggalan dan kemerosotan nilai-nilai sosial serta keagamaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia pada awal XX. Dalam beberapa literatur tersebut, disinggung pula tentang persentuhan antara Muhammadiyah dengan beberapa kebijakan pemerintah Hindia Belanda, terutama dalam masalah pendidikan dan keagamaan, yang pada hakekatnya tidak pernah berpihak kepada kepentingan masyarakat Indonesia pada saat itu. Sepanjang tahun 1912-1942, Muhammadiyah telah mendirikan beberapa puluh sekolah-sekolah setarap sekolah milik pemerintah dan dari proses pendidikan yang diusahakannya tersebut terkandung maksud untuk menumbuhkan sikap nasionalisme yang pada akhirnya dapat mendorong semangat kebersamaan untuk melepaskan diri dari penjajahan.

Setelah menelaah hasil studi tentang Muhammadiyah tersebut, penulis melihat bahwa belum ada studi yang membahas tentang Peran Muhammadiyah dalam mensikapi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia pada tahun 1912-1942.

### **Kerangka Teori**

Penelitian ini merupakan salah satu penelitian tentang peran Muhammadiyah dalam menghadapi kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan Historis, yang langkah-langkahnya terdiri dari “pengumpulan data, kritik sumber, intepretasi dan historiografi.” Selain itu, untuk menjelaskan teori

tentang peran, penulis mempergunakan pendekatan sosiologi. Dalam teori sosiologi yang dirumuskan Soerjono Soekanto (1970, hal. 268) beliau mengatakan bahwa terdapat teori tentang lapisan masyarakat yang mempunyai dua unsur pokok, yaitu kedudukan dan peranan, kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peranan tanpa ada kedudukan atau tidak ada kedudukan tanpa peranan.

Kedudukan atau status kadang-kadang dibedakan dengan kedudukan sosial (Sosial Status). Kedudukan (Status) diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang-orang lainnya dalam kelompok tersebut atau tempat suatu kelompok sehubungan dengan kelompok-kelompok lainnya di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Sedangkan kedudukan sosial artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, *prestigenya*, dan hak-haknya serta kewajiban-kewajibannya.

Kedudukan sosial tidaklah semata-mata berarti kumpulan kedudukan-kedudukan seseorang dalam kelompok-kelompok yang berbeda, akan tetapi kedudukan-kedudukan sosial tersebut mempengaruhi kedudukan orang tadi dalam kelompok-kelompok sosial yang berbeda, akan tetapi kedudukan-kedudukan sosial tersebut mempengaruhi kedudukan orang tadi dalam kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Untuk mempermudah mendapat pengertian kedua istilah tersebut dipergunakan dalam arti yang sama dan digambarkan dengan istilah kedudukan atau status saja.

Peranan (*Role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya dan hal itu sekaligus berarti bahwa peranan tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat.

Pentingnya peranan adalah bahwa hal itu mengatur perikelakuan seseorang, dan juga peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, sehingga dengan demikian orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perikelakuan sendiri dengan perikelakuan orang-orang sekelompoknya. Maka hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu-individu dalam masyarakat.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan masyarakat, posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (*Social Position*) merupakan unsur yang statis yang menunjukkan pada fungsi,



penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya dikatakan bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Peranan mencakup paling sedikit tiga hal, (Soekanto, 1970; 268), yaitu ;

1. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial.

Berdasarkan teori tentang peran tersebut, dapat dikatakan bahwa persyarikatan Muhammadiyah yang lahir dimasa penjajahan Hindia Belanda, telah menjalankan perannya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat pribumi, baik dalam masalah politik, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan. Disamping itu, sebagai pergerakan yang memiliki kedudukan sosial, Muhammadiyah telah menjalankan kewajiban dan tugasnya dalam menghadapi kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Peran tersebut dapat dilihat dalam bentuk tindakan kongkrit, seperti : Partisipasi tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam pergerakan politik maupun dalam dewan rakyat, mendirikan sekolah yang setaraf dengan lembaga pendidikan pemerintah, meningkatkan kegiatan dakwah Islam untuk menghambat kristenisasi dan membentengi akhlaq pelajar dari bahaya westernisasi.

Selain itu, Muhammadiyah juga menunjukkan sikap tegas atau menolak kebijakan pemerintah Hindia Belanda, seperti terhadap Staatsblad 1905 no. 550 tentang ordonansi pendidikan, yang diterapkan pada masa gubernur Jendral Idenburg (1909-1916), terhadap staatsblad 1925 no. 219 tentang pengawasan guru, yang dilaksanakan oleh Mr. D. Fock (1921-1926), dan terhadap Staatsblad 1932 no. 494 dan 495 tentang penutupan sekolah liar di masa Mr.B.C. de Jonge (1931-1936). Begitu pula terhadap Kristenisasi dan westernisasi, yang mereka terapkan.

### **Definisi Konseptual**

Judul kajian penelitian ini adalah “Peran Muhammadiyah dalam menghadapi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia tahun 1912-1942.” Istilah peran tidak dapat terlepas dari aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka

dia menjalankan suatu peranan. Berkaitan dengan ini, Muhammadiyah selaku pergerakan yang lahir di masa penjajahan merupakan salah satu unsur pergerakan nasional yang berhadapan langsung dengan kebijakan “rangkaiian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak,” yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Peran Muhammadiyah dalam menghadapi kebijakan pemerintah Hindia Belanda dapat dilihat dalam kontribusi Muhammadiyah yang ikut memperjuangkan hak-hak politik bagi masyarakat pribumi, dan upaya untuk memperoleh pendidikan yang setara bagi masyarakat Indonesia. Disamping itu, peran tersebut dapat dilihat pada saat Muhammadiyah menjalankan kewajiban-kewajibannya, seperti mendirikan lembaga-lembaga pendidikan modern, da'wah Islam dan membina moral masyarakat.

### **Metodologi Penelitian**

#### - Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yang jenisnya termasuk kajian pustaka (*library research*) yaitu berusaha menggali dan menelaah sumber data yang menunjang penelitian ini secara teliti dan tekun.

#### - Metode Penelitian

Penelitian ini, menggunakan metode historis. Menurut Louis Gottschalk (1975, hal. 32) metode sejarah adalah sebuah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau manusia. Rekonstruksi yang imajinatif daripada masa lampau itu berdasarkan data yang diperoleh (melalui kritik sumber) dengan menempuh cara demikian disebut *historiografi*.

Jadi yang dimaksudkan dengan pengertian methode sejarah ialah seperangkat aturan atau prinsip-prinsip dasar yang sistematis yang digunakan dalam proses pengumpulan data atau sumber-sumber, mengerti dan menafsirkannya serta menyajikannya secara sintesis dalam bentuk sebuah cerita sejarah (*historiografi*)

Menurut Ahmad Syalabi (1978, hal.26-28) dalam metode historis ini ada empat tahap yang harus dilakukan, yaitu:

##### 1. *Heuristik* (proses pengumpulan data)

Pada tahap ini, penulis mengumpulkan sumber-sumber sejarah dalam usaha memperoleh data-data mengenai subjek yang terkait langsung (Kuntowijoyo 1994,

hal. 50). Gosttschalk (1975, hal. 35) juga menyatakan pendapatnya bahwa “dalam pengumpulan sumber-sumber sejarah, semakin cermat pembatasannya mengenai perorangan, wilayah, waktu dan fungsi, semakin besar kemungkinannya bahwa sumber-sumber data akan ada keterkaitannya dengan subyeknya.

## 2. Kritik Sumber

Pada tahap kedua, penulis melakukan kritik terhadap sumber yang dipergunakan dalam penelitian ini. Kritik sumber berguna untuk menentukan apakah sumber sejarah yang ada itu dapat dipergunakan atau tidak, atau juga untuk melihat kebenaran dari sumber tersebut.

## 3. Interpretasi

Interpretasi merupakan proses penafsiran yang meliputi analisis dan sintesis data sehingga menjadi penulisan sejarah yang dapat dipercaya (Kuntowijoyo 1995, hal. 100). Demikian Kartodirjo (1993, hal. 30) mengatakan interpretasi merupakan penggunaan konsep secara teori yang ada pada disiplin ilmu sejarah. Pada tahap ini, penulis berusaha menguraikan dan menghubungkan data yang diperoleh kemudian diberi penafsiran untuk merekonstruksi peristiwa sejarah sehingga dapat dimengerti.

## 4. *Historiografi*

*Historiografi* merupakan tahap terakhir dalam metode sejarah. Menurut Kuntowijoyo (1994, hal. 89) *historiografi* adalah merekonstruksi suatu gambaran masa lampau berdasarkan data-data yang telah diperoleh di lapangan. Rekonstruksi dapat eksis apabila hasil-hasil penelitian tersebut ditulis sebagai tulisan yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.

### - Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu :

1. Sumber primer “Sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama” (Surakhmad 1982, hal. 134) Berupa dokumen “laporan tertulis dari suatu peristiwa, yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu, dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan keterangan mengenai peristiwa tersebut.” (Surakhmad, hal. 133) Adapun dokumen yang dipergunakan adalah :

- a. Statuten Reglement, extract der besluit perhimpeonan Muhammadiyah Yogyakarta
- b. Khutbatul ‘Arsy, PB Muhammadiyah 1932, 1935, 1937, 1938, 1939, 1940 dan 1942

- c. C. Snouck Hurgronje trj. S. Maimun dan Rahayu 1994, Kumpulan Surat Snouck Hurgronje IV-X, Jakarta
2. Sumber Sekunder “Sumber yang mengutip dari sumber lain” (Surakhmad, hal. 134), seperti :
  - a. Djarnawi Hadikusuma TT, Djarnawi Hadikusuma, Yogyakarta, Persatuan
  - b. Prof. Abdul Munir Mul Khan, Pemikiran K.H. Dahlan, Jakarta, Bumi Aksara
  - c. Majelis Diktilitbang PP. Muhammadiyah, 2010, Seabad Muhammadiyah, Jakarta, Kompas.

- Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini di peroleh dengan cara :

1. Studi dokumen “laporan tertulis dari suatu peristiwa, yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran terhadap suatu peristiwa, dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan keterangan mengenai peristiwa tersebut.” (Surakhmad, hal. 133)
2. Wawancara, yaitu “Suatu percakapan yang diarahkan pada masalah tertentu atau Tanya jawab” dengan beberapa orang sepepuh Muhammadiyah, yaitu : H.M. Suropto dan H.M. Tusin

- Teknik Analisa Data

Untuk mengkaji data-data yang telah diperoleh maka digunakan analisa kualitatif, yaitu dengan cara mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (B. Miles dan Huberman 1992, hal. 16) Selain itu, penulis juga menggunakan teknik analisis isi (*Content analysis*) yaitu suatu metode studi dan analisis data secara sistematis dan objektif. Atau suatu metode studi untuk mengkaji makna data, selanjutnya data yang telah dipolakan, difokuskan dan disusun secara sistematis, kemudian disimpulkan sehingga makna data itu bisa ditemukan secara objektif.

- Pendekatan keilmuan

Penggunaan pendekatan historis yaitu “proses pengujian dan penganalisaan secara kritis terhadap rekaman peninggalan-peninggalan masa lampau.” (Gottschalk, 48-49). Penggunaan pendekatan historis dalam tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan-kenyataan sejarah tentang kondisi masyarakat Islam di Indonesia di masa penjajahan, kebijakan pemerintah Hindia Belanda, sejarah

kelahiran Muhammadiyah, dan perannya dalam menghadapi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia tahun 1912 -1942.

Pendekatan sosiologis, yaitu “suatu pendekatan yang berfungsi untuk melihat segi-segi sosial peristiwa yang dikaji, seperti golongan sosial mana yang berperan, serta nilai-nilainya, hubungan dengan orang lain, konflik berdasarkan kepentingan, ideologi, dan lain sebagainya.” (Kartodirdjo, hlm. 4) Dalam konteks tulisan ini, penggunaan pendekatan sosiologis bertujuan untuk melihat situasi dan kondisi sosial umat Islam di masa penjajahan dan peran Muhammadiyah dalam menghadapi kebijakan pemerintah Hindia Belanda tahun 1912-1942.

### **Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam penelitian ini akan dituangkan ke dalam lima bab, termasuk pendahuluan dan penutup serta lampiran-lampiran yang terkait satu dengan yang lainnya secara logis dan organis.

*Bab pertama*, berisi tentang ; Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, Batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Definisi konseptual, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

*Bab kedua*, menjelaskan tentang ; Sejarah dan perkembangan Muhammadiyah, yang meliputi ; Sejarah Kelahiran Muhammadiyah, latar belakang berdirinya, organisasi Muhammadiyah, Visi dan Misi, amal usaha, pemahaman keagamaan, dan perkembangan Muhammadiyah dari tahun 1912-1942.

*Bab ketiga*, menguraikan tentang ; Kondisi masyarakat Islam dan kebijakan Pemerintah Hindia Belanda di Nusantara tahun 1912-1942; yang meliputi : Kondisi dan kebijakan politik, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan.

*Bab keempat*, berisi analisa tentang ; Sikap dan peran Muhammadiyah dalam menghadapi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda di bidang Politik, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan.

*Bab kelima*, merupakan bab penutup yang terdiri dari ; Simpulan, Saran, dan Rekomendasi.

## BAB II

### SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MUHAMMADIYAH

#### **Sejarah Kelahiran Muhammadiyah**

Muhammadiyah merupakan organisasi Islam di Indonesia, yang lahir di zaman penjajahan Belanda dan tetap berkembang hingga saat ini. Mengenai pengertian Muhammadiyah, Solihin Salam mendefinisikannya sebagai berikut “Muhammadiyah berasal dari nama “Muhammad” ditambah huruf Yah, yang artinya pengikut-pengikut Muhammad s.a.w. Sedangkan dari segi istilah “menghimpun umat Islam untuk mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad s.a.w.” (Salam 1965, hal. 56) Berkenaan dengan defenisi tersebut, Soewarno menjelaskan bahwa :

Muhammadiyah diambil dari bahasa Arab yang memiliki pengertian Nama Rasul terakhir Muhammad Saw. Putra Abdullah bin Abdul Mutholib, pembawa risalah Islam yang paling sempurna, diutus untuk semua ummat manusia sepanjang masa. Firman Allah menyebutkan Muhammad Rasulullah *kho-tamul anbiya-I wal mursalin*, Muhammad Rasul Allah penutup sekalian nabi dan Rasul. Muhammad adalah orang yang terpuji. Ya *sibhu, nisbi*, penjenisan dan penyempurnaan, pengidentikan. Muhammadiyah disebutkan sebagai orang-orang Islam yang hidup di masa dan sesudah Nabi Muhammad s.a.w. yang mengikuti segala sunnah, tuntunan dan ajaran beliau sepanjang ajaran Islam. Ummat Islam yang hidup dan kehidupannya mengikuti, mencintai dan menghidupkan sunnah, tuntunan dan pelajaran serta melangsungkan usaha Da’wah Islam Amar Ma’ruf nahi Munkar, mengamalkan Islam yang murni itu namanya Muhammadiyah. (Soewarno 1995, hal. 26)

Dari defenisi tersebut, penulis berpendapat bahwa Muhammadiyah dapat diartikan sebagai jama’ah ummat Islam yang mengikuti (*ittiba’*) *sunnaturrasul* Muhammad s.a.w. Dan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang segala gerakannya mengambil, menauladani, mengambil dan mengikuti perjuangan Nabi Muhammad s.a.w. Dengan bentuk organisasi yang tertib, rapi dan baik dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya tujuan, segera meratanya ajaran dan pembangunan masyarakat sepanjang tuntunan Islam.

Persyarikatan Muhammadiyah berdiri pada tanggal “18 Nopember 1912, ... bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1330 Hijriyah.” (Tim Pembina AIK UMM, hlm.35) Mengenai awal berdirinya Muhammadiyah, terdapat keterangan lain yang

menyatakan bahwa “Secara resmi berdirinya Muhammadiyah ditandai oleh penanggalan surat permohonan Kyai Haji Ahmad Dahlan kepada pemerintah Hindia Belanda tertanggal 20 Desember 1912.” (Mulkan 1990, hal. 27) Penetapan tanggal tersebut, mengacu kepada “Muhammadiyah memproklamkan berdirinya pada bulan Desember 1912 dengan upacara resmi di Malioboro dihadiri sekitar 70 Orang.” (Majelis Diktilitbang dan LPI 2010, hal. 26) Bertolak dari perbedaan tersebut, persyarikatan Muhammadiyah menetapkan tanggal 18 Nopember 1912 atau 08 Dzulhijjah 1330 Hijriyah sebagai tanggal kelahiran Muhammadiyah.

### **Latar Belakang berdirinya Muhammadiyah**

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya gerakan pembaharuan Muhammadiyah, dalam hal ini terdapat beberapa pandangan penulis, seperti Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), sebagaimana yang dikutip oleh Syafii Maarif yang menyatakan bahwa ada tiga faktor yang mendorong lahirnya gerakan Muhammadiyah. (Syafii 1986, hal. 66).

Pertama, keterbelakangan serta kebodohan umat Islam Indonesia di hampir semua aspek kehidupan.

Ke dua, Kemiskinan yang sangat parah yang diderita umat Islam justru dalam suatu negeri yang kaya seperti Indonesia

Ke tiga, Keadaan pendidikan Islam yang sudah sangat kuno sebagaimana yang dapat dilihat melalui pesantren.

Tiga faktor tersebut merupakan corak yang mewarnai kehidupan umat Islam Indonesia di awal abad ke dua puluh, yang disebabkan oleh kebijakan kolonialis yang diarahkan untuk menciptakan kebodohan, ketertinggalan dan kemiskinan masyarakat Islam Indonesia. Sehingga mereka tidak memiliki kekuatan untuk memiliki semangat untuk merdeka.

Sedangkan menurut K.H. Ahmad Badawi, beliau menambahkan sebagai berikut :

1. Didorong oleh hati nurani yang dijiwai Nur Wahyu Ilahi dan niat *ittiba'* Nabi Muhammad s.a.w. sebagian ulama Islam yang sadar, dan berusaha membina ummat dan masyarakat agama berjuang dan bangkit membangun bangsanya.
2. Adanya pengaruh alam pikiran Modern Islam dari Negara-negara Islam di Mesir, Hijaz, Damaskus dan sebagainya.(Margono, hal. 28)

Sedangkan Mukti Ali menyatakan bahwa ada lima faktor yang menyebabkan lahirnya Muhammadiyah,(Mukti Ali 1985, hl. 21), yaitu :

Pertama, adanya pengaruh kebudayaan India terhadap Indonesia



Ke dua, adanya pengaruh Arab terhadap Indonesia, terutama sejak dibukanya terusan suez

Ketiga, pengaruh Muhammad Abduh dan golongan Salafiyah

Ke empat, adanya penetrasi dari bangsa-bangsa Eropa

Ke lima, adanya misi Katholik dan Protestan

Lima faktor yang dikemukakan oleh Mukti Ali tersebut, lebih cenderung menyatakan bahwa lahirnya Muhammadiyah disebabkan oleh pengaruh dari luar kehidupan masyarakat Islam Indonesia.

Bertolak dari pendapat beberapa orang yang telah melakukan studi terhadap faktor yang mendorong kelahiran Muhammadiyah, Solihin Salam mengungkap adanya faktor intern dan faktor ekstern,” (Salam 1956, hal. 55-56).

Faktor intern maksudnya adalah gambaran tentang :

1. kondisi keagamaan masyarakat Indonesia pada awal abad ke dua puluh, yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits, karena merajalelanya perbuatan syirik, bid'ah dan khurafat yang menyebabkan Islam menjadi beku.
2. Keadaan bangsa Indonesia serta umat Islam yang hidup dalam kemiskinan, kebodohan, kekolotan dan kemunduran.
3. Tidak terwujudnya semangat ukhuwah Islamiyah dan tidak adanya organisasi Islam yang kuat.
4. Lembaga pendidikan Islam tak dapat memenuhi fungsinya dengan baik, dan sistem pesantren yang sudah sangat kuno.

sedangkan faktor ekstern, mencakup :

1. Adanya kolonialisme Belanda di Indonesia.
2. Kegiatan serta kemajuan yang dicapai oleh golongan Kristen dan Katholik di Indonesia.
3. Sikap sebagian intelektual Indonesia yang memandang Islam sebagai agama yang telah ketinggalan zaman
4. Adanya rencana politik kristenisasi dari pemerintah Belanda demi kepentingan politik kolonialnya.

Memperhatikan beberapa pendapat kalangan sejarawan tersebut, penulis menilai bahwa fakta yang mereka ungkapkan menggambarkan tentang situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Islam pada tahun 1912-1942, baik secara intern maupun ekstern yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah.

Sejalan dengan studi yang dilakukan oleh beberapa orang peneliti tentang sejarah Muhammadiyah, pembicaraan mengenai faktor yang melatar belakangi lahirnya Muhammadiyah terus mengalami perkembangan. Dalam hal ini Kamal Pasha menambahkan, “Faktor Subyektif yang sangat kuat, ... yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pendalaman Kiyai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Qur'an, baik dalam hal gemar membaca maupun menelaah, membahas, dan mengkaji

isi kandungannya.” (Pasha 2003, hal. 120) Kiyai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sesungguhnya dalam rangka *mentadabburi*, mencermati dan melaksanakan kandungan firman-firman Allah, di antaranya dalam surat QS. Ali Imran/3 : 104, sebagai berikut :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma’ruf dan mencegah yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”(Departemen Agama R.I 1985, hlm.93)

Dengan memasukkan hasil kajian Kiyai Haji Ahmad Dahlan terhadap Surat Ali Imran 104, sebagai salah satu faktor yang melatar belakangi lahirnya Muhammadiyah. Maka fakta-fakta yang diungkapkan oleh kalangan peneliti sebelumnya semakin lengkap, dan oleh sebab itu penulis mengelompokkan sebab-sebab berdirinya Muhammadiyah sebagai berikut :

a. Internal	b. eksternal
Q.S. Ali Imron (3) : 104	Pembaharuan Islam
Tahayul, Bid’ah, Khurafat	Kolonialisasi Hindia Belanda
Pendidikan masih tradisional	Kristenisasi

## Organisasi Muhammadiyah

### a. Struktur Organisasi

Pada awal pertumbuhan dan berdirinya, “Muhammadiyah secara langsung di pimpin oleh Kiyai Haji Ahmad Dahlan dengan di Bantu oleh beberapa anggota pengurus hingga wafat beliau pada tahun 1923.” (Mul Khan 1990, hlm. 78) Secara lengkap susunan pengurus Muhammadiyah pada saat berdiri dan disahkan Pemerintah Hindia Belanda adalah “Kyai Haji Ahmad Dahlan, Haji Abdullah Siradj, Haji Ahmad, Haji Abdurrahman, R. Haji Syarkawi, Haji Mohammad, R. Haji Djaelani, Haji Anis, Haji Moehammad Faqih.” (Majelis Diktilitbang dan LPI, hlm. 26)

Pada periode awal atau sejak tahun 1912-1921, pemilihan ketua dilakukan dalam suatu rapat tahunan yang dinamakan “*algemeene Vergadering*, pada tahun 1922 rapat

tahunan dinamakan *Yaarvergadering*, dan pada tahun 1923 disebut Perkumpulan tahunan.” (Hadikusuma TT, hlm.63) Di awal masa pertumbuhan ini, “Muhammadiyah dipimpin oleh KH. Ahmad Dahlan, beliau selalu terpilih dalam rapat tahunan walaupun dalam beberapa kali rapat KH. Ahmad Dahlan tidak menghadirinya.” (kusuma, hal. 11) Keberadaan organisasi Muhammadiyah mendapat pengakuan dari Pemerintah Hindia Belanda, sesuai dengan “Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 81. tanggal 22 Agustus 1914, yang diubah dan disempurnakan dengan Surat Keputusan No. 40 tanggal 16 Agustus 1920, diubah dan disempurnakan lagi dengan Surat Keputusan No. 36 tanggal 2 September 1921.” (Tim Pembina AIK UMM, hal. 35)

Perubahan Surat Keputusan tersebut, disebabkan oleh perkembangan Organisasi Muhammadiyah, yaitu :

Pada awal berdirinya Muhammadiyah terbatas untuk wilayah kekuasaan Residensi Yogyakarta. Namun, oleh karena perluasan gerak dan perkembangan organisasinya, pada tahun 1920, Pemerintah Hindia Belanda memperluas gerak formal kewilayahan dalam wilayah kekuasaan Belanda di seluruh Pulau Jawa. Satu tahun kemudian batas kewilayahan itu diterobos Muhammadiyah dengan perluasan wilayah gerak oleh pemerintah Hindia Belanda di seluruh wilayah kekuasaan Hindia Belanda, karena, pada tahun itu pula (1921) Organisasi Muhammadiyah telah menjangkau meliputi daerah yang tersebar di seluruh Hindia Belanda dengan berdirinya Grup-grup dan Gerombolan atau Ranting dan Cabang Muhammadiyah dalam wilayah tersebut. (Mulkan, hal. 22)

Surat keputusan tersebut berfungsi untuk memperkuat kedudukan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam di hadapan Pemerintah Hindia Belanda, agar tidak dipandang rendah, dihina dan terhindar dari sikap semena-mena kaum kolonialis Belanda yang sangat benci terhadap Islam.

Adapun isi dari Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 36 tanggal 2 September 1921, (Tim Pembina AIK UMM, hal. 39) berbunyi sebagai berikut :

1. Mensahkan berdirinya persyarikatan Muhammadiyah di Hindia Belanda untuk waktu 29 tahun sejak tanggal berdirinya. Diberi hak bekerja menjalankan missinya dengan mengadakan berbagai kegiatan dan menyelenggarakan amal usaha yang sesuai dengan missinya.
2. Mengakui bahwa persyarikatan Muhammadiyah berbadan hukum Barat (*Eroupesche rechts persoon*). Dipersamakan kedudukannya dengan bangsa/orang Belanda di dalam dan di luar pengadilan.
3. Idzin berdirinya setiap habis masa berlakunya dapat dimintakan perpanjangan

Dalam rangka penertiban organisasi, “Muhammadiyah membentuk berbagai bagian untuk membina berbagai amal usaha yang tumbuh dan berkembang di berbagai pelosok daerah, sekaligus merupakan pembagian kerja pimpinan yang secara khusus bertanggung jawab terhadap kemajuan gerak Muhammadiyah.” (Mulkhan, hal. 81)

Bagian-bagian yang dibentuk pada tahun 1920 tersebut, adalah :

Pertama, bagian sekolah, bagian ini merupakan kegiatan Muhammadiyah yang berkaitan dengan urusan pendidikan dan sekolah Muhammadiyah. Kedua, bagian Tabligh, bagian ini berhubungan dengan kegiatan Muhammadiyah yang menyangkut masalah penyiaran dan pengajaran agama Islam. Ketiga, Bagian Taman Pustaka, bagian ini merupakan kegiatan Muhammadiyah yang berhubungan dengan karang mengarang, penerbitan, dan penyiaran. Ke empat Bagian Penolong Kesengsaraan umum, bagian ini berkaitan dengan urusan penyantunan anak yatim, fakir miskin, dan kesengsaraan umum lainnya. (Majelis Diktilitbang PP. Muhammadiyah 2010, hal. 51)

Sesuai dengan perkembangan yang terjadi, tiga bagian baru dibentuk dalam Pengurus besar pada tahun 1921, ketiga bagian ini adalah :

bagian takwimuddin yang bertanggung jawab atas keuangan organisasi sehingga selalu tersedia dana untuk setiap kegiatan. Bagian Yayasan bertugas mengurus pekerjaan bagi organisasi Muhammadiyah, dan bagian pertolongan haji merupakan bagian yang memberikan pertolongan kepada jamaah haji selama perjalanan pergi pulang serta selama menunaikan ibadah haji di makkah maupun Madinah. (Dep. Pen. R.I 1996, hal. 129)

Setelah Kiyai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia pada tahun 1923, kepemimpinan Muhammadiyah dilanjutkan oleh para sahabat atau muridnya, yaitu

Kiyahi Haji Ibrahim (1923- 1934) yang dibantu oleh K.H. Fakhrudin (wakil ketua I), H. mukhtar wakil ketua II, M. Basiran, Hadikusumo, H. Hadjid, H. Suja' dan H. Abdul Hamid sebagai pembantu yang pada waktu itu diistilahkan Juru Periksa (Commissaris), Ngabehi Joyosugito dan Mohammad Husni masing-masing sekretaris I dan II. Pada periode ini Muhammadiyah telah tersebar hampir ke seluruh wilayah Hindia Belanda. (Hadikusuma, TT, hal. 14)

Pada tahun 1927, dibentuklah majelis Tarjih yang berfungsi “mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-masalah tertentu yang dipertikaikan oleh masyarakat muslim.” (Majelis Diktilitbang PP. Muhammadiyah, hlm. 104)

Sepeninggal Kiyahi Haji Ibrahim, Muhammadiyah di pimpin oleh “H. Hisyam yang terpilih menjadi ketua Pengurus Besar Muhammadiyah dalam konggres ke 23 di Yogyakarta tahun 1934, konggres ke 24 di Banjarmasin pada tahun 1935, ... konggres ke 25 atau konggres seperempat abad di Betawi pada tahun 1936.” (Hadikusuma, hal. 33) Selama masa kepemimpinannya yang berlangsung selama dua tahun, beliau di

Bantu oleh “KH. Fakhruddin sebagai wakil ketua dan H. Yunus Anis sebagai sekretaris, dan beliau wafat pada tahun 1945.” (Hadikusuma, hal.34)

Dalam kongres Muhammadiyah ke 26 di Yogyakarta pada tahun 1937, yang terpilih menjadi ketua Pengurus Besar adalah “KH. Mas Mansur yang dibantu oleh H.A. Badawi, H. Mohammad Farid Ma’ruf, H. Abdullah, H. Basiran, H. Abdulhamid Bkn, H. Hasyim, H. Moehadi dan R.H. Doeri. Beliau memimpin Muhammadiyah sampai tahun 1942.” (Hadikusuma, hal.41)

Setelah tahun 1921 izin operasional Muhammadiyah di perluas ke seluruh wilayah Hindia Belanda, hal ini di sebabkan oleh lahirnya cabang – cabang muhammadiyah di seluruh pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Bertolak dari perkembangan organisasi Muhammadiyah tersebut, maka struktur organisasi Muhammadiyah terdiri dari Struktur Vertikal yang terdiri dari Pengurus Besar Muhammadiyah yang berkedudukan di Yogyakarta sebagai pusat organisasi, dan Pimpinan Cabang yang berada di tingkat daerah, sedangkan struktur terbawah yang terdiri satuan yang terkecil disebut Ranting. Disamping itu, dalam struktur organisasi muhammadiyah terdapat susunan horizontal yaitu bagian-bagian atau majelis yang bertugas membantu ketua dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, yaitu bagian Tabligh, sekolahan/pengajaran, Tarjih, dan majelis Pertolongan Keselamatan Umat. Sedangkan struktur kepemimpinan terdiri dari seorang ketua, yang dibantu wakil ketua, sekretaris dan beberapa orang anggota. Pimpinan Muhammadiyah dibantu oleh beberapa bagian, yaitu “bagian Tabligh, Bagian Sekolahan, Bagian Tarjih, Bagian Taman Pustaka, Bagian Penolong Kesengsaraan umum, dan Bagian Yayasan.

#### b. Visi dan Misi

Sebagai organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan, Muhammadiyah memiliki Visi “Berjuang dan mengajak segenap golongan dan lapisan bangsa Indonesia, untuk mengatur dan membangun tanah air ..., sehingga merupakan masyarakat dan negara yang adil dan makmur, sejahtera bahagia, materiil dan spiritual yang diridloi Allah SWT.” (Nashir, 1994, hlm. 132)

Sedangkan yang menjadi misi Muhammadiyah (Rais 1997, hal. 15), adalah sebagai berikut :

1. Melepaskan umat Islam dari kungkungan takhayul, bid’ah dan khurafat yang membelenggu umat dari pemahaman tauhid yang benar.

2. Memajukan pendidikan umat Islam dengan memberikan angkatan mudanya ilmu-ilmu Barat dalam rangka merebut kebahagiaan keduniaan yang harus dikejar oleh umat Islam
3. Membina persaudaraan di kalangan masyarakat Islam, menghormati kebebasan seseorang menjalani kehidupan di dunia yang akan dipertanggung jawabkan masing-masing di hadapan Allah, menghargai persamaan derajat manusia, dan menegakkan keadilan.

#### c. Usaha-Usaha Muhammadiyah

Usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah selama dipimpin K.H. Ahmad Dahlan ialah tabligh. Pengertian sederhana dari tabligh ialah “menyampaikan seruan agama atau pelajaran agama, baik kepada orang yang belum memeluk agama Islam ataupun kepada orang Islam yang belum mengerti tentang ajaran agamanya.” (Hasyim 1990, hal. 52) Untuk keperluan tabligh itulah K.H.A. Dahlan memberikan pelajaran agama Islam kepada para “pelajar Kweekschool Gubernemen di Jetis Yogyakarta sebelah utara dan Sekolah Pamong Projo O.S.V.I.A. (*Opleidingschool Voor Inlandsche Ambtenaren*) di Magelang. Pelajaran agama itu diberikan kepada para pelajar yang berminat di luar jam pelajaran.” (Dep. Pen. R.I, hal. 131) Di samping sangat rajin memberi pengajian kepada warga Muhammadiyah, beliau juga sangat giat memberikan ceramah agama terhadap masyarakat umum. “Pengajian tersebut diadakan di gedung sekolah negeri atau swasta lain, atau digedung organisasi lain, langkah itu diambil adalah untuk lebih memperkenalkan Muhammadiyah dan untuk menjalin silaturahmi dengan lain golongan. Dengan itu maka Muhammadiyah berhasil mendapat simpati yang luas.” (Hasyim, hal. 131)

Di samping pengajian tersebut di atas, “di Yogyakarta di adakan kursus Islam khusus bagi pelajar bermacam-macam sekolah H.I.S. pada sore hari. Amat menarik perhatian bahwa sekolah-sekolah pemerintah yang digunakan tempat pengajian itu berada di daerah dan kota yang belum berdiri Muhammadiyah.” (Dep. Pen. R.I, hal. 132) Itu membuktikan bagaimana luwesnya pendekatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah pada waktu itu, apalagi di samping gedung sekolah banyak pula gedung-gedung perkumpulan lain yang dipinjamnya. “Untuk mencetak mubaligh di Yogyakarta di adakan pengajian mubaligh, gurunya terdiri dari K.H.A. Dahlan sendiri dan anggota-anggota pengurus besar lainnya.” (Mulkhan 1995, hlm. 81) Para santri ditugaskan bertabligh di pelosok-pelosok dan harus melaporkan pekerjaannya di depan pengurus Muhammadiyah pada saat itu. Selogan mereka ialah *ballighuu ‘annii walau aayah*, yang maksudnya ialah perintah agar setiap muslim wajib bertabligh meskipun

baru mengetahui satu ayat Al-Qur'an . “Pengajian atau kursus muballigh semacam itu di contoh oleh daerah-daerah, yang telah berhasil mengeluarkan mubalighin militan yang bangga atas pekerjaannya yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah.” (Dep. Pen. R.I., hlm. 132)

Di samping bergerak di bidang tabligh yang dilaksanakan di masjid-masjid, K.H. Ahmad Dahlan melakukan pembaharuan di bidang pendidikan, yaitu “dengan cara mengajarkan pelajaran umum dan agama yang di sekolah Muhammadiyah yang diselenggarakan dengan cara meniru sistem kelas yang diterapkan di sekolah milik pemerintah.” (Arifin, 1990, hlm. 56) “Pada tahun 1923 di Yogyakarta baru berdiri 6 buah, yakni 4 sekolah angka dua 5 klas, sebuah sekolah angka satu (HIS) dan sekolah calon guru satu buah. Di samping itu mempunyai sebuah madrasah. Semua itu dengan jumlah pelajar 1084 orang dan guru 48 orang.” (Dep.Pen. R.I., hal. 132) Pada tahun 1925, Perkembangan dalam bidang pendidikan meliputi delapan *Holland Inlandse School*, sebuah sekolah guru di Yogyakarta, 32 buah sekolah dasar lima tahun, sebuah *Schakelschool*, 14 madrasah, seluruhnya dengan 119 orang guru dan 4000 orang murid. Pada akhir tahun “1932 Muhammadiyah telah memiliki 103 *Volkschool*, 47 *Standardschool*, 69 *Hollands Inlandse School* (HIS), dan 25 *Schakelschool*, yaitu sekolah 5 tahun yang akan menyambung ke *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO).”(Hadikusuma,hal. 34) Pendidikan Muhammadiyah mengalami perkembangan yang cukup pesat di masa kepemimpinan KH. Hisyam (1934-1936), hal ini terlihat dalam prakarsa beliau dalam memperbaiki pendidikan masyarakat dengan cara :

Membuka sekolah dasar 3 tahun yang pada zaman itu dinamakan *Volkschool* atau sekolah desa dengan menyamai persayaratan dan kurikulum *Volkschool Gubernemen*. Sesudah itu dibukanya pula *Vervolgschool* Muhammadiyah sebagai lanjutannya. Maka bermunculan *volkschool* dan Muhammadiyah di Indonesia, terutama di Jawa. Ketika pemerintah *vervolgschool* membuka *standardschool* yaitu SD 6 tahun, maka Muhammadiyahpun membuka sekolah semacam itu. Di samping itu dibukanya pula *Hollands Inlandse School met de Quran* Muhammadiyah untuk menyamai pemerintah dan untuk menandingi usaha Katolik yang telah mendirikan HIS *met de Bijbel*. (Hadikusuma, TT, hal. 33)

Peran serta Muhammadiyah dalam mengembangkan dunia pendidikan, sangat membantu masyarakat pribumi dalam mengentaskan buta aksara, sehingga “pada tahun 1937 muhammadiyah telah memiliki 986 lembaga pendidikan dengan jumlah peserta didik sebanyak 160.182 orang.” (Mul Khan, hal. 88)

Selain itu, Muhammadiyah bergerak juga di bidang pelayan kesehatan yang di lakukan oleh “bagian PKU yang bermula dengan membuka klinik dan poliklinik yang

dipimpin oleh Dokter Soemowidigdo. Usaha itu walaupun permulaannya tersendat-sendat, namun karena dijalankan dengan tekun akhirnya memperoleh kemajuan yang berarti hingga rata-rata tiap hari orang yang berobat tidak kurang dari enam puluh orang.”(Mul Khan, hal.82) Pelayan kesehatan diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan bangsa dan agama. Kepada mereka “diwajibkan membeli karcis seharga 10 sen serta membayar harga obat yang digunakan, sedang mereka yang tidak mampu dibebaskan sama sekali dari pembayaran.” (Depen R.I., hlm. 132) Selain dokter pribumi, “Muhammadiyah memakai dokter Belanda, ... yang suka menolong ...” (Sukrianto dan Mul Khan 1985, hal. 77) Setiap hari “sabtu dan senin diadakan tabligh agama Islam dan penerangan tentang kebersihan dan penjagaan kesehatan.” (Mul Khan, hlm. 80) Walaupun pelayanan kesehatan ini memungut biaya dari masyarakat yang mampu, akan tetapi Muhammadiyah tidak pernah mengambil keuntungan, karena hasil iuran tersebut disubsidikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Oleh karena itu “balai pengobatan tersebut tiap bulannya menanggung rugi hingga bagian PKU harus menutup kerugian itu sedikitnya 100 gulden tiap bulan, yang diambilkan dari pengumpulan iuran, ... warga besar Muhammadiyah.” (Dep. Pen. R.I., hal. 132)

Pada tahun 1920 Muhammadiyah berhasil “membangun rumah sakit PKU di jalan Ngabean Yogyakarta, dan sebuah rumah miskin yang pertama kali menampung 16 laki-laki dan 15 wanita terdiri dari orang Jompo, orang melarat dan bekas gelandangan. Pada akhir tahun jumlah itu meningkat menjadi 60 lelaki dan 28 wanita.” (Dep. Pen. R.I., Hal. 132) Mereka diberi semua keperluan hidupnya yakni makan, pakaian dan papan dan dilatih berkerja menurut kadar usia dan kekuatannya. “Disamping itu diberi pelajaran agama dan beribadah. Amal usaha bagi PKU tidak hanya itu saja , tetapi juga mendirikan rumah yatim dengan mula-mula menampung 12 anak. Sebagaimana layaknya mereka juga dipelihara dan disekolahkan serta dibimbing pelaksanaan ibadahnya.” (Dep.Pen. R.I., hal. 132)

### **Pemahaman keagamaan**

Agama Islam menurut faham Muhammadiyah adalah “segala perintah dan larangan Allah yang merupakan pola (*hudan/furqan*) pengembangan hidup manusia duniawi dan ukhrawi.”(Mul Khan, 1990, hlm.64) Agama Islam adalah “wahyu syari’at Tuhan yang merupakan petunjuk Tuhan kepada manusia untuk bisa mengetahui apa sebetulnya maksud Tuhan menciptakan manusia dan apa rencana Tuhan bagi manusia



dalam hidup di dunia,” (Tim Pembina AIK 1990, hlm. 68) Agama Islam adalah agama Allah, Agama yang mendapat predikat “Al-Islam” adalah agama Allah, hal ini ditegaskan sendiri oleh Tuhan dalam firmanNya yang tersebut dalam QS. Ali Imran/3 : 19, sebagai berikut :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam”(Depag R.I. 1985, hlm.78)

Berdasarkan ayat tersebut, Agama Islam memiliki pengertian sebagai berikut “wahyu Allah, agama yang haq, syah dan benar di sisi Allah, sesuai di segala zaman dan tempat, cocok untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, untuk kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Agama Islam itu diberikan kepada para nabi dan Rasul sejak Adam a.s. sampai dengan Nabi Muhammad saw.” (Suwarno 1995, hal. 32) Ajaran Islam itu merupakan syari’at Allah yang lengkap, sempurna, risalah Nabi Muhammad saw. Agama yang berupa wahyu Tuhan, wahyu syari’at Tuhan yang menjadi petunjuk bagi manusia bagaimana hidup di dunia. Adalah agama yang disebut agama Islam. Allah menegaskan bahwa agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama yang disebut al-Islam, yaitu agama atau yang berupa wahyu, wahyu syari’atNya, wahyu yang mengandung peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh manusia itu disebut wahyu syari’at yang terbagi menjadi dua macam, yakni :

1. Berujud firman-firman Allah, yang dalam bahasa Arab disebut kalam Allah, wahyu yang berupa firman, yang berupa kalam, ialah lafadz dan maknanya sudah jadi. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang berupa kalam Allah itu hanya sekadar membacakan kepada Rasul. Jadi diterima seutuhnya, karena sudah berupa firman. Sedangkan lafadz (ucapan) dan maknanya sudah selesai. Malaikat Jibril tinggal menyampaikan dengan membacakan wahyu itu kepada Rasul-Nya. Wahyu yang berupa kalam itu kemudia terhimpun dalam apa yang disebut kitab “himpunan wahyu Allah yang berupa firman-firman atau kalam. Nabi Musa mempunyai kitab Taurat, itu wahyu Allah berupa kalam, yang terhimpun. Nabi Dawud mempunyai kitab yang bernama Zabur. Nabi Isa mempunyai kitab yang bernama Injil. Kemudian wahyu yang berupa kalam Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad saw yang dihimpun disebut al-Qur’an.(Tim Pembina AIK, 1990, hal. 68)
2. Wahyu yang bukan berupa kalam, berbeda dengan wahyu berupa kalam. Wahyu jenis ini hanya berupa pengertian. Wahyu jenis ini oleh malaikat disampaikan kepada Rasul hanya seperti dibisikkan dalam hatinya, dengan dihembuskan di dalam pengertian atau di dalam kesadaran Rasul. Cuma pengertiannya saja yang diterima Rasul. Kemudian Rasul menyampaikan kepada sahabat-sahabat dengan bahasa Rasul. Dengan ucapan Rasul. Jadi

ucapannya merupakan perkataan rasul yang mengandung pengertian yang diterima dari wahyu. (Tim Pembina AIK 1990, hal. 68)

Wahyu jenis kedua itu maksudnya untuk menjelaskan lebih lanjut pengertian-pengertian yang terkandung dalam kalam Allah. Penjelasan-penjelasan itu dapat berupa sabda-sabda Nabi atau berupa perbuatan-perbuatan nabi yang menjelaskan bagaimana melaksanakan apa yang terkandung dalam Al-kitab.

Agama Allah yang terakhir ialah “agama yang diterima Nabi Muhammad saw sebagai Rasul terakhir. Sebagaimana yang diterima beberapa Nabi sebelumnya, itu juga berupa wahyu syari’at Allah yang berujud kalam Allah dan terhimpun dalam kitab yang disebut al-Qur’an.” (Tim AIK UMM, hal. 69) Sedangkan yang bukan berupa kalam, kemudian oleh para ulama disebut sebagai “As-Sunnah. As-Sunnah itu wahyu Allah yang tidak berupa kalam Allah, yang diturunkan kepada Nabi. Fungsinya untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang menjadi kandungan al-kitab atau al-Qur’an.” (Ash-Shiddieqy 1974, hal. 24)

Agama Islam yang berlaku sekarang adalah agama yang diterima oleh Muhammad Rasulullah saw, yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Dengan demikian agama-agama yang pernah diajarkan oleh para Nabi dan Rasul terdahulu, sudah habis masa berlakunya atau boleh dikatakan sebagai agama yang sudah kadaluwarsa. Oleh karena masa berlakunya sudah habis, Allah lalu menurunkan agama Islam sebagai agama terakhir yang menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya.

Penyempurnaan itu berupa: mana yang sudah tidak sesuai, di ganti; mana yang sudah diselewengkan, dibetulkan. Hingga agama yang terdahulu sudah tidak berfungsi lagi. Dicukupkan dengan agama yang datang kemudian, yang dibawa oleh Rasulullah saw. “Agama Islam yang terdahulu, yang dibawa oleh Rasul-rasul sebelum nabi Muhammad, hanya untuk kaum tertentu, yang dibawa nabi Musa untuk umat tertentu, ialah keturunan Israel, Bani Israel.” (Tim AIK UMM, hal. 70) Sedangkan Nabi Muhammad diutus untuk manusia seluruhnya. Dan karena Nabi Muhammad merupakan rasul terakhir, maka agama Nabi Muhammad berlaku sepanjang masa. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad menyempurnakan agama-agama yang terdahulu dan berlaku sepanjang masa. Karena tidak ada Rasul lagi. Itulah wujud agama Islam.

Agama Islam sejak pertama sampai yang dibawa Rasulullah sebetulnya merupakan peraturan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Di dalam Al-Qur’an sering disebut agama Islam merupakan Risalah

Allah. Risalah itu artinya pesan, message. Pesan Allah kepada manusia. Pesan pengarahan mengenai hidup dan kehidupan yang dikehendaki atau diridhai Allah bagi manusia di dunia. Jadi Agama Islam merupakan “konsepsi hidup dari Allah, berupa peraturan-peraturan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia dalam seluruh seginya, baik yang lahir maupun yang batin. Meliputi segala aspeknya: akidah, akhlak, ubudiyah, sosial, ekonomi, budaya, politik dan lain-lain.” (Tim Pembina AIK 1990, hlm. 70)

### **Perkembangan Muhammadiyah dari tahun 1912-1942**

Pada periode awal, persyarikatan Muhammadiyah mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini disebabkan oleh “Ketekunan dan kegigihan kiyai Haji Ahmad Dahlan dan kawan-kawannya telah berhasil, secara lambat laun namun pasti, membawa Muhammadiyah ke seluruh daerah keresidenan Yogyakarta.” (Dep.Pen 1996, hlm. 129) Hal ini sesuai dengan izin yang diberikan pemerintah Hindia Belanda, yaitu “wilayah kegiatan dan geraknya, secara formal terbatas dalam daerah Residensi Yogyakarta.” (Mul Khan 1990, hal. 78) Mereka berhasil mendirikan ranting-ranting Muhammadiyah di desa-desa. “Dimasukinya desa-desa untuk memberikan pengajian agama serta keterangan mengenai hal-hal yang erat hubungannya dengan organisasi muhammadiyah, dan pada waktu-waktu tertentu para pengurus ranting-ranting itu datang ke kota untuk menerima pengajian dari K.H.A. Dahlan.” (Dep.Pen. R.I, hal. 129)

Kegiatan da'wah yang dilakukan K.H.A. Dahlan mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat, dan oleh sebab itu memasuki tahun 1914 Muhammadiyah mulai berkembang ke luar Yogyakarta. Hal ini ditandai oleh munculnya kelompok pengajian di beberapa tempat, seperti :

Pengajian agama yang didirikan oleh H. Misbah dengan nama kursus Islam pada tahun 1914 berjalan dengan banyak mendapat perhatian dari kaum Muslimin di Surakarta. Karena kemajuan kursus itu dan disebabkan kekurangan guru maka diundanglah K.H.A. Dahlan untuk menjadi mubaligh tetap. Kemudian namanya diubah menjadi pengajian Shiddiq Amanah Tabligh Vathanah (SATV). Pengajian ini akhirnya menjadi Muhammadiyah cabang surakarta. (Dep. Pen. R.I, hal. 129)

Seiring dengan “perkembangan Muhammadiyah ke luar wilayah residensi Yogyakarta, maka pada tahun 1920 Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan besluit yang menyatakan bahwa wilayah gerak Muhammadiyah diperluas untuk seluruh daerah di Pulau Jawa.” (Mul Khan, hal. 78) Dengan pelan menyusullah cabang-cabang berdiri di luar Yogyakarta, seperti “cabang Surakarta, Purwokerta, Pekalongan, Pekajangan,

Purbolinggo, Klaten, Balapulang, Blora, Klaten, Surabaya, Kepanjen, Garut dan Betawi. Cabang-cabang itulah yang telah berdiri pada tahun 1923, tahun wafatnya K.H.A. Dahlan.” (Dep. Pen R.I, hal. 129) Tidak lama sesudah perluasan daerah kerja tersebut, “Besluit Muhammadiyah itu pun diperbaharui lagi pada tahun 1921, yakni sembilan tahun sejak berdirinya, wilayah gerak Muhammadiyah diubah kembali, sehingga wilayah gerak Muhammadiyah tersebut meliputi seluruh daerah di Hindia Belanda.”(Mulkhan, hal. 78)

Dalam kurun waktu 1924 sampai dengan 1932, perkembangan Muhammadiyah di pulau Jawa cukup pesat, “hal ini terlihat dari pertumbuhan cabang pada tahun 1923 yang berjumlah 15, menjadi 51 cabang pada tahun 1926, dan menjadi 153 pada tahun 1932.”(Majelis Diktilitbang PP. Muhammadiyah 2010, hal. 68)

Setelah terbitnya Besluit Pemerintah Hindia Belanda tahun 1921, perkembangan Muhammadiyah telah mencapai beberapa daerah di luar pulau Jawa, yaitu “lampung, Madura, makassar, Sumatera barat, Bangka Belitung, Palembang, Sumatera utara, Aceh dan Kalimantan.” (Majelis Diktilitbang dan LPI, hal. 104) Menurut catatan yang ada, pada tahun 1927 “Jumlah cabang dan grup Muhammadiyah di seluruh Hindia Belanda telah mencapai jumlah 176 di tambah 68 cabang ‘Aisyiyah.” (Mulkhan, hal. 84) “Pada tahun 1932 tercatat 283 cabang untuk seluruh Indonesia, dengan anggota keseluruhan sebanyak 44.879, sebagian besar berasal dari Jawa.” (Mejelis Diktilitbang PP. Muhammadiyah, hal. 68)

Perhatian K.H.A. Dahlan tidak hanya tertuju kepada pembinaan kaum pria. Hal ini terlihat pada saat beliau mengumpulkan kaum ibu di kampungnya pada hari-hari tertentu dan diberinya pengajian agama. Lama-kelamaan anggota pengajian itu dibentuk menjadi semacam perkumpulan wanita dengan nama :

Sapa Tresna yang maknanya adalah : Perkumpulan orang-orang yang menaruh kasih sayang. Ini terjadi sejak tahun 1914 yang kemudian pada tahun 1917 diganti namanya menjadi Aisyiyah yang maksudnya ialah perkumpulan kaum wanita yang akan mencontohkan akhlaq dan kecerdasan Siti ‘Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. (Mulkhan 1990, hal. 21)

Pada awal berdirinya organisasi ini di pimpin oleh “Nyai H.A.Dahlan sendiri. Kemudian ‘Aisyiyah ini merupakan bagian dalam Muhammadiyah yang mengurus dan membina anggota Muhammadiyah wanita.” (Dep.Pen R.I, hlm. 130) Dalam rangka pembinaan terhadap kaum wanita “K.H.A. Dahlan mempunyai gagasan untuk membangun masjid khusus kaum putri. Gagasannya ini terlaksana dengan berdirinya Masjid Putri yang indah untuk ukuran pada masa itu. Sayang Kiyai tidak sempat melihat

karena masjid itu selesai sesudah beliau wafat.” (Dep.Pen R.I, hal. 130) Program pertama yang dilakukan oleh Sapatresna disamping kegiatan pengajian adalah “mengusahakan agar setiap ibu/wanita peserta pengajian Sapatresna memakai kerudung (penutup kepala) dari kain sorban putih.” (Mul Khan 1990, hal. 79) Selain bergerak di bidang keagamaan, “Aisyiyah mengadakan Bustanul Athfal, sekolah anak-anak yang kurang dari tujuh tahun, umumnya menjadi contoh cabang-cabang yang kemudian mengadakan pula.”(Sukriyanto dan Mul Khan 1985, hal. 79)

Sewaktu K.H.A. Dahlan menyampaikan da’wah di Surakarta, “beliau melihat anak-anak pandu berbaris dengan tegap dan rapih di halaman istana Mangkunegaran. Maka terlintas dalam pikirannya untuk mendirikan kepanduan semacam itu dalam Muhammadiyah.” (Dep. Pen R.I, hal. 129) Tertarik terhadap keterampilan yang diperagakan oleh anak-anak pandu kraton Mangkunegaran Solo tersebut, “akhirnya sekitar tahun 1918 terbentuklah organisasi kepanduan Muhammadiyah dengan nama Hizbul-Wathan atau pembela Tanah air, dalam waktu yang singkat Kepanduan Hizbul Wathan berkembang ke seluruh cabang-cabang Muhammadiyah, yang tersebar di seluruh Hindia Belanda.” (Majelis Diktilitbang dan LPI, hal. 104)

Perkembangan Hizbul Wathan menimbulkan kekhawatiran Pemerintah Hindia Belanda, hal ini terlihat dari sikap pejabat negeri yang menghalang-halangnya, yaitu :

Tidak diperkenankan berpakaian lengkap dan tidak boleh mengadakan gerakan yang kelihatan oleh orang, ... Anehnya, Reseering menjawab kepada Volksraad, “Tidakkah pernah dilarang Padvinder di Semarang berjalan di jalan raya dengan memakai uniformnya. Anehnya, jawaban itu tidak cocok dengan kenyataannya. Hizbul Wathan masih juga dihalang-halangi ... (Sukriyanto dan Mul Khan 1985, hal. 75)

Sikap antipati Pejabat Pemerintah tersebut, berawal dari kekhawatiran mereka terhadap Pandu Hizbul Wathan yang dapat menumbuhkan sikap cinta tanah air dan menimbulkan perlawanan terhadap pemerintah, sebagaimana pidato KH. Fakhrudin di depan ratusan pandu Hizbul Wathan yang antara lain mengatakan bahwa “tongkat-tongkat yang mereka panggul itu pada suatu ketika nanti akan menjadi senapan dan bedil ... Jendral Sudirman adalah seorang kepala Pasukan Hizbul Wathan dari Banyumas.”(Hadikusuma, TT, hal.23) Sewaktu Hizbul Wathan diajak bergabung dalam NIPV (*Nederlandsch Indische Padvinders Vereeniging*), Fakhrudin menolak dengan tegas karena Hizbul Wathan sudah mempunyai dasar sendiri, yakni Islam, sudah mempunyai induk sendiri, yaitu Muhammadiyah ...”(Hadikusuma, TT, hal. 23)

Setelah Kiyai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia pada tahun 1923, kepemimpinan Muhammadiyah dilanjutkan oleh para sahabat atau muridnya, yaitu

Kiyahi Haji Ibrahim (1923- 1934) yang dibantu oleh K.H. Fakhrudin (wakil ketua I), H. mukhtar wakil ketua II, M. Basiran, Hadikusumo, H. Hadjid, H. Suja' dan H. Abdul Hamid sebagai pembantu yang pada waktu itu diistilahkan Juru Periksa (Commissaris), Ngabehi Joyosugito dan Mohammad Husni masing-masing sekretaris I dan II. Pada periode ini Muhammadiyah telah tersebar hampir ke seluruh wilayah Hindia Belanda. (Hadikusuma, TT, hal. 14)

Setelah memimpin Muhammadiyah selama sebelas tahun, Kiyahi Haji Ibrahim “meninggal dunia pada tahun 1934, dalam usia 46 tahun.” (Hadikusuma, hal. 16) dimasa kepemimpinannya, bidang pendidikan mendapat perhatian yang khusus. Hal ini dapat dilihat dalam perkembangan pendidikan Muhammadiyah ”pada tahun 1923 di Yogyakarta baru berdiri 6 buah, yakni 4 sekolah angka dua 5 klas, sebuah sekolah angka satu (HIS) dan sekolah calon guru satu buah. Di samping itu mempunyai sebuah madrasah. Semua itu dengan jumlah pelajar 1084 orang dan guru 48 orang.” (Dep.Pen. R.I., hal. 132) Dalam tahun 1925, organisasi ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, yaitu :

Telah mempunyai 29 cabang-cabang dengan 4.000 orang anggota, sedangkan kegiatannya dalam bidang pendidikan meliputi delapan *Holland Inlandse School*, sebuah sekolah guru di Yogyakarta, 32 buah sekolah dasar lima tahun, sebuah *Schakelschool*, 14 madrasah, seluruhnya dengan 119 orang guru dan 4000 orang murid. Dalam bidang sosial, ia mencatat dua buah klinik di Yogyakarta dan Surabaya dimana 12.000 pasien memperoleh pengobatan, sebuah rumah miskin dan dua buah rumah yatim piatu. (Noer 1990, hal. 95)

Pada akhir tahun “1932 Muhammadiyah telah memiliki 103 *Volkschool*, 47 *Standaardschool*, 69 *Hollands Inlandse School* (HIS), dan 25 *Schakelschool*, yaitu sekolah 5 tahun yang akan menyambung ke *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO).” (Hadikusuma, hal. 34)

Sepeninggal Kiyahi Haji Ibrahim, Muhammadiyah di pimpin oleh “H. Hisyam yang terpilih menjadi ketua Pengurus Besar Muhammadiyah dalam kongres ke 23 di Yogyakarta tahun 1934, kongres ke 24 di Banjarmasin pada tahun 1935, ... kongres ke 25 atau kongres seperempat abad di Betawi pada tahun 1936.” (Hadikusuma, hal. 33) Selama masa kepemimpinannya yang berlangsung selama dua tahun, beliau di Bantu oleh “KH. Fakhrudin sebagai wakil ketua dan H. Yunus Anis sebagai sekretaris, dan beliau wafat pada tahun 1945.” (Hadikusuma, hal.34) Pada masa ini “jumlah anggota Muhammadiyah meningkat menjadi 43.000 orang, tersebar di 710 cabang ... 316 di Jawa, 286 di Sumatera, 79 di Sulawesi dan 29 di Kalimantan.” (Noer, hal. 95)

Pendidikan Muhammadiyah mengalami perkembangan yang cukup pesat di masa kepemimpinan KH. Hisyam (1934-1936), hal ini terlihat dalam prakarsa beliau dalam memperbaiki pendidikan masyarakat dengan cara :

Membuka sekolah dasar 3 tahun yang pada zaman itu dinamakan *Volkschool* atau sekolah desa dengan menyamai persayaratan dan kurikulum *Volkschool Gubernemen*. Sesudah itu dibukanya pula *Vervolgschool* Muhammadiyah sebagai lanjutannya. Maka bermunculan *volkschool* dan Muhammadiyah di Indonesia, terutama di Jawa. Ketika pemerintah *vervolgschool* membuka *standaardschool* yaitu SD 6 tahun, maka Muhammadiyahpun membuka sekolah semacam itu. Di samping itu dibukanya pula *Hollands Inlandse School met de Quran* Muhammadiyah untuk menyamai pemerintah dan untuk menandingi usaha Katolik yang telah mendirikan HIS met de Bijbel. (Hadikusuma, TT, hal. 33)

Kebijaksanaan KH. Hisyam dalam melancarkan usaha pendidikan Muhammadiyah ialah “memodernisir sekolah-sekolah Muhammadiyah selaras dengan kebijakan pendidikan pemerintah.” (Hadikusuma, hal. 33) Hal ini dimaksudkan “agar mereka yang ingin memasukkan puteranya ke sekolah-sekolah umum, tidak usah memasukkannya ke sekolah umum milik pemerintah Hindia Belanda. Lebih baik anak-anak itu belajar di sekolah Muhammadiyah yang selain mutunya sama, masih dapat dipelihara pendidikan agamanya.” (Sukriyanto dan Mulkhan 1995, hal. 50)

Dalam periode 1937-1942 Muhammadiyah di pimpin K.H. Mas Masyur, di masa kepemimpinannya Muhammadiyah mengalami perkembangan organisasi yang cukup signifikan, yaitu “921 cabang dengan 112. 850 anggota, ... 401 cabang di pulau Jawa 368 cabang di Sumatera, 105 cabang di Sulawesi, 33 cabang di Kalimantan, 14 Cabang tersebar di beberapa daerah.” (Majelis Diktilitbang PP. Muhammadiyah, hal. 90) Pada umumnya di cabang-cabang telah berdiri pula sekolah Muhammadiyah atau madrasah, Perkembangan amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan mengalami perkembangan yang cukup pesat, berdasarkan catatan “pada tahun 1937 Muhammadiyah telah memiliki 986 lembaga pendidikan dengan jumlah peserta didik sebanyak 160.182 orang.” (Mulkhan, hal. 88) Sedangkan “pada tahun 1938 terdapat 852 Cabang dan 898 kelompok, seluruhnya dengan 250.000 anggota, ... 834 masjid dan langgar, 31 Perpustakaan umum, 1.774 sekolah.” (Noer, hal. 95) Setelah peristiwa sumpah pemuda yang terjadi pada tahun 1928, “dalam kongres ke 23 tahun 1934, Muhammadiyah mengubah nama-nama sekolah Muhammadiyah yang berbahasa Belanda dengan bahasa Indonesia, seperti *Kweekschool* menjadi Madrasah Moe'allimin Muhammadiyah, *Normaalschool* menjadi Sekolah Goerroe, dll.”(Mulkhan, hal. 85). Hal tersebut dilakukan dalam rangka merealisasikan semangat nasionalisme dengan cara

memberlakukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang dipergunakan oleh organisasi Muhammadiyah baik dalam pertemuan resmi maupun tidak resmi.



## BAB V

### SIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan :

Pertama, Kondisi masyarakat Islam Indonesia tahun 1912-1942, di tinjau dari segi politik berada dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, yang mengakibatkan Ketertinggalan di bidang pendidikan dan hampir 90% masyarakat pribumi dalam keadaan buta huruf, dan dari segi keagamaan terdapat praktek keagamaan yang menyimpang, seperti tahayul, bid'ah dan churafat, begitu pula di bidang kebudayaan, mengalami kemandegan yang diakibatkan oleh kurangnya pendidikan yang memadai..

Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda tahun 1912-1942, di bidang politik mengalami perubahan, yang dapat dilihat dalam penerapan politik etis yaitu politik balas budi, di sisi yang lain upaya tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan penjajahan. Di bidang Pendidikan, masyarakat pribumi diperbolehkan untuk mengikuti pendidikan di sekolah pemerintah, tetapi membatasi penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat pribumi, dan mengawasi guru-guru agama Islam. Di bidang keagamaan, mengawasi kegiatan para haji, mendudukan hukum adat sejajar dengan hukum Islam dan mendukung kristenisasi. Begitu pula di bidang kebudayaan, pemerintah kolonialis menerapkan westernisasi dengan cara pembiasaan budaya Barat terhadap kalangan priyayi.

Ke-dua, sikap dan peran Muhammadiyah dalam menghadapi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda adalah sebagai berikut :

Sikap Muhammadiyah Terhadap kebijakan politik, dapat dilihat pada pendirian Muhammadiyah yang tidak pernah terlibat langsung dengan gerakan-gerakan politik yang pernah muncul sepanjang tahun 1912-1942, tetapi secara ideologis muhammadiyah senantiasa mendukung perjuangan gerakan politik yang memperjuangkan aspirasi masyarakat Islam, dan terhadap pengawasan pendidikan, Muhammadiyah menunjukkan sikap menentang. Begitu pula terhadap Kristenisasi, Muhammadiyah menyampaikan protes yang disampaikan dihadapan penasehat pemerintah Sedangkan terhadap kebijakan kebudayaan, Muhammadiyah menentang proses westernisasi dengan cara memberikan pendidikan agama kepada anak didiknya.

Peran Muhammadiyah dalam menghadapi kebijakan pemerintah Hindia Belanda, dapat dilihat dalam keterlibatan anggota-anggotanya dalam kegiatan politik, dan melalui

anggota Muhammadiyah yang duduk dalam dewan rakyat berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat Islam dapat diusulkan kepada pemerintah. Di bidang pendidikan, Muhammadiyah mendirikan sekolah modern, yang menerapkan kurikulum umum dan agama kepada murid-muridnya. Sedangkan di bidang keagamaan, Muhammadiyah menyelenggarakan da'wah yang ditujukan kepada masyarakat yang belum Islam maupun yang sudah Islam, terutama ditujukan untuk menghadapi kristenisasi terhadap masyarakat yang sudah Islam. Begitu pula untuk mengantisipasi weternisasi, Muhammadiyah menekankan pendidikan budi pekerti dan menumbuhkan sifat nasionalisme di etngah-tengah masyarakat.

### **Saran-saran**

Berpatokan pada hasil pembahasan dan hasil kesimpulan penelitian ini, maka ada beberapa hal yang menjadi saran penulis:

*Pertama*, kepada pimpinan persarikatan Muhammadiyah hendaklah bersikap konsisten dalam masalah politik, yaitu tidak melibatkan organisasi Muhammadiyah ke dalam tataran politik praktis, akan tetapi senantiasa berkomitmen sebagai gerakan moral yang senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat.

*Kedua*, kepada pimpinan amal usaha khususnya dalam bidang pendidikan hendaknya senantiasa meningkatkan kualitas lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan perguruan Tinggi, yaitu dengan cara mendudukkan amal usaha sebagai salah satu elemen dari gerakan dakwah yang diharapkan dapat melahirkan insan yang unggul di bidang intelektual dan anggun secara moral.

*Ketiga*, kepada majelis tabligh dan tarjih hendaklah senantiasa melakukan inovasi di bidang pemikiran Islam guna membentuk masyarakat Islam yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

*Keempat*, kepada anggota dan simpatisan Muhammadiyah, hendaklah senantiasa menjaga sikap terbuka dengan cara menghormati dan menghargai perbedaan yang terjadi di kalangan masyarakat Islam Indonesia baik yang berkaitan dengan praktek ibadah maupun kebudayaan. Sehingga tidak mudah dipecah belah atau diperalat oleh kekuatan asing.

## **Rekomendasi**

Dalam proses penelitian tesis yang berjudul “Peran Muhammadiyah dalam Menghadapi Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1912-1942” penulis menemukan data-data penting menyangkut pertumbuhan dan perkembangan Muhammadiyah sepanjang tahun 1912-1942, seperti keterlibatan K.H. Ahmad Dahlan di dalam berbagai kegiatan Budi Utomo dan hubungan pribadi beliau dengan tokoh organisasi tersebut, yang sedikit banyak memberikan kontribusi pemikiran kepada Beliau dalam mendirikan Muhammadiyah, bahkan ikut membantu dalam proses penerbitan izin pendirian organisasi yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Beliau juga menjalin hubungan baik dengan tokoh politik Islam di Solo, seperti Haji Oemar Said Cokroaminoto yang menempatkan beliau sebagai salah seorang tokoh sentral Sarekat Islam. Keterlibatan Beliau dalam Budi Utomo maupun Sarekat Islam, dipergunakannya untuk menyampaikan pesan-pesan modernisme dalam Islam kepada anggota pergerakan tersebut, dengan maksud menanamkan aqidah yang murni, ibadah yang benar, akhlaq yang mulia dan muamalah duniawiyah yang baik.

Dalam berda'wah K.H. Ahmad Dahlan menekankan pentingnya spiritualisme, hal ini dapat dilihat dalam gerakan pemurnian Islam, yang mengarahkan agar umat Islam dapat menjalankan aqidah dan ibadah sesuai dengan Al-qur'an dan Sunnah, selain itu beliau mengajarkan berjihad dengan harta yang beliau contohkan dengan mengorbankan harta bendanya dalam mendirikan Muhammadiyah.

Mengingat data-data tersebut tidak dibahas secara khusus dalam tesis ini, maka penulis merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji topik-topik sebagai berikut :

1. Peran tokoh Budi Utomo dalam penerbitan Surat izin pendirian Muhammadiyah
2. Pandangan H. Oemar Said Cokroaminoto dan K.H. Ahmad Dahlan terhadap pergerakan nasionalisme di Indonesia
3. Konsep K.H. Ahmad Dahlan tentang spiritualisme

## REFERENSI

- Abdullah, Slamet, dan Muslich, 2010, *Seabad Muhammadiyah dalam Pergumulan Budaya*, Yogyakarta, Global Pustaka
- Abdulgani, Roeslan, dkk, 1985, *Cita Dan Citra Muhammadiyah*, Jakarta, Pustaka Panji Mas.
- Ansory, Nasruddin, 2010, *Matahari Pembaharuan*, Yogyakarta, Galangpress.
- Aripin, MT, 1990, *Muhammadiyah Potret yang Berubah*, IGPFBS & KS, Surakarta
- Azhar, Muhammad & Hamim Ilyas, 2000, *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah : Purifikasi dan Dinamisasi*, Yogyakarta, LPPI.
- Azra, Azyumardi, 2004, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Akar Pembaharuan Islam di Indonesia, Bandung, Mizan.
- Baudet, H, & Brugmans, I.J., Penerjemah Amir Sutarga, 1983, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Cahyono, Edi, 2003, *Zaman Bergerak di Hindia Belanda*, Jakarta, Pancur Siwah.
- Gobee, E dan Adriaanse, C., Penerjemah Sukarsi, 1993, *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, Jilid VIII, Jakarta, Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic.
- , Penerjemah Sutan Maimun dan Rahayu, 1994, *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, Jilid IX, E., Jakarta, Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic.
- , Penerjemah Sukarsi, 1994, *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, Jilid VIII, Jakarta, Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic.
- Departemen Penerangan RI, 1986, *Siapa Yang Tidak tahu Muhammadiyah*, Jakarta.
- Gottschalk, 1956, *Understanding History A Primary Of Historical*, New York, Ifred dan knop
- Hamzah, Amir, 1968, *Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam*, Malang, Mutia
- Hadikusuma, Djarnawi, TT, *Matahari-Matahari Muhammadiyah*, Yogyakarta, Persatuan

- Hasbullah, 2001, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Hasyim, Umar, 1990, *Muhammadiyah Jalan lurus*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Hurgronje, Snouck, Penerjemah S. Gunawan, 1983, *Islam di Hindia Belanda*, Jakarta, Bharata karya Aksara.
- Kartodirdjo, Sartono, 1993, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, Gramedia
- Kartodirjo, Sartono, 1999, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900 Dari Imperium Sampai Imperium*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo, 1994, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta, Tiara Wicana
- kutoyo, Sutrisno, 1998, *Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Persyarikatan Muhammadiyah*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Majelis Diktilitbang dan LPI PP. Muhammadiyah, 2010, 1 Abad Muhammadiyah, Jakarta, Kompas.
- Mulkan, Abdul Munir, 1990.a, *Pemikiran K.H.A. Dahlan dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Mulkan, Abdul Munir, 1990.b, *Warisan Intelektual K.H. Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah*, PT. Yogyakarta, Percetakan Persatuan.
- Mulkan, Abdul Munir, 2003, *Nyufi Cara Baru (Kiai Ahmad Dahlan dan Petani Modernis)*, Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Mulkan, Abdul Munir, 2010, *Pesan dan Kisah Kiai Ahmad Dahlan*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah.
- Najamudin, 2005, *Perjalanan Pendidikan di Tanah Air (1800-1945)*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nata, Abudin, 2005, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia*, Jakarta.
- Nashir, Haedar 2010, *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan*, Yogyakarta, Surya Sarana Grafika
- Noer, Deliar, 1996, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta, LP3ES
- Notosusanto, Nugroho, 1992, *Sejarah Nasional Indonesia 2*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Nurhadi, M. Musawir, 1997, *Dinamika Pemikiran Islam dan Muhammadiyah*, Yogyakarta, LPD-PPM.
- Pasha, Musthafa Kamal, dan Jusuf, Chusnan, 2000, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Dakwah Islamiyah*, Yogyakarta, Citra Karsa mandiri.
- Poespo Suwarno, M. Margono, 1990, *Gerakan Islam Muhammadiyah*, Yogyakarta, Persatuan
- Pringgodigdo, A.K. 1991, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta, Dian Rakyat.
- Ricklefs, Mc., Penerjemah Drs. Dharmono Hardjowidjono, 2007, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta, Gajah Mada University.
- Sairin, Weineta, 1995, *Gerakan Pembaharuan muhammadiyah*, Jakarta, Sinar Harapan.
- Shiraisi, Takashi, 1997, *Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Jakarta, Garafiti
- Steenbrink, Karel A, 1984, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke -19*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Suara Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Kader PP. Muhammadiyah, 2009, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah (idiologi, Khittah, dan langkah)*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah.
- Sukrianto, AR dan Abdul Munir Mulkhan, 1985, *Perkembangan Pemikiran Muhammadiyah dari Masa ke Masa*, Yogyakarta, PT. Dua Dimensi.
- Suminto, Aqib, 1985, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta,
- Sunanto, Musyrifah, 2005, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali
- Suratno, Siti Chamamah, 2009, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Seni Budaya*, Yogyakarta, LPM UAD.
- Suryanegara, Ahmad Mansyur, 1996, *Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali.
- Suwendi, 2004, *Sejarah Pemikiran Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Tim Pembina AIK UMM, 1990, *Muhammadiyah Sejarah Pemikiran dan amal Usaha*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana.
- Van Neil, Robert, Penerjemah Zahara Deliar Noer, 1984, *Munculnya Elite Modern Indonesia*, Jakarta, Pustaka Jaya.

Vlekke, Bernard H.M., Penerjemah Samsudin Berlian, 2010, *Nusantara Sejarah Indonesia*, Jakarta, Gramedia.

Wirjosukarto, Amir Hamzah, 1992, Kiyai Haji Mas Mansur, Yogyakarta, PT. Persatuan.

Yunus, Mahmud, 1996, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Hidakartya Agung



